

**PROSES PENYELESAIAN TALAK YANG SUDAH TERJADI DI LUAR
SIDANG PENGADILAN AGAMA DITINJAU MENURUT HUKUM
ISLAM**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I B Bangkinang)

S K R I P S I

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)**



OLEH :

**ADE SAPUTRA
NIM. 10721000040**

**PROGRAM S 1
JURUSAN AHWAL AL- SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2012**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : “PROSES PENYELESAIAN TALAK YANG SUDAH TERJADI DI LUAR SIDANG PENGADILAN AGAMA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang)”. Skripsi ini ditulis berdasarkan latar belakang bahwa, dalam Islam setiap suami boleh menceraikan isterinya kapan saja yang suami inginkan karena hak talak itu berada ditangan suami baik suami dalam keadaan bercanda atau main-main. Di Indonesia, masalah perceraian di atur oleh UU perkawinan No. 1 tahun 1974. Dalam pasal 39 ayat 1 UU perkawinan dan pasal 115 KHI dinyatakan bahwa; “*perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*”. Dalam masyarakat, ternyata masih ada di antara suami yang menceraikan isterinya diluar sidang Pengadilan Agama. Ketika kasusnya dibawa ke Pengadilan Agama Bangkinang, suami kembali mengucapkan lafaz talak didepan sidang Pengadilan Agama tersebut. Disini terjadi pengulangan lafaz talak, yakni talak yang diucapkan diluar sidang Pengadilan Agama dan lafaz talak yang diucapkan didepan Sidang Pengadilan Agama Bangkinang. Oleh keadaan demikian bagaimanakah proses penyelesaian talak yang sudah terjadi di luar sidang pengadilan agama tersebut dalam tinjauan hukum islam.

Permasalahan pada penelitian ini adalah: bagaimana pelaksanaan talak di Pengadilan Agama Bangkinang, bagaimana proses penyelesaian talak di Pengadilan Agama Bangkinang terhadap talak yang terjadi diluar sidang Pengadilan Agama, lalu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Proses Penyelesaian talak yang sudah terjadi di luar sidang Pengadilan Agama. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan talak di Pengadilan Agama Bangkinang, Untuk mengetahui proses penyelesaian talak jika telah terjadi talak diluar sidang Pengadilan Agama Bangkinang dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Proses Penyelesaian talak yang sudah terjadi di luar sidang Pengadilan Agama. Subjek dalam penelitian ini adalah pasangan suami isteri yang melakukan perceraian di luar sidang pengadilan Agama Bangkinang yaitu sebanyak tiga pasangan.

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yang berlokasi di Pengadilan Agama kelas 1. B Bangkinang di Jalan Jendral Sudirman No. 99 Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara observasi, wawancara dan konten analisis. Setelah data terkumpul kemudian ditulis dan di analisa dengan cara menggunakan metode deskriptif analitik, deduktif dan induktif.

Pelaksanaan talak di Pengadilan Agama Bangkinang, Pemohon mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Agama Bangkinang, kemudian penetapan majelis hakim, penetapan hari sidang, pemeriksaan alat bukti yaitu saksi-saksi dan pembacaan putusan Pengadilan. Pada saat kasusnya putus, maka pemohon (suami) mengucapkan lafaz talak di depan sidang Pengadilan Agama

Bangkinang dan dihitung sebagai talak satu raj'i walaupun Sebelumnya pemohon telah mengucapkan lafaz talak di luar sidang Pengadilan Agama Bangkinang.

Proses Penyelesaian Talak di Pengadilan Agama Bangkinang Terhadap Talak yang Terjadi di luar Sidang Pengadilan Agama Bangkinang, hakim tetap memeriksa perkaranya tanpa mempertimbangkan adanya pengucapan lafaz talak di luar sidang Pengadilan Agama Bangkinang. Prosesnya sama dengan penyelesaian perkara permohonan talak secara umum.

Berdasarkan analisis dari data-data tersebut, ternyata proses penetapan bahwa talak hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama berdasarkan pada wajib adanya kesaksian dalam talak sebagaimana berpendapat pada sebagian besar ulama Syi'ah Imamiyah, pendapat Ali bin Abi Thalib serta ulama lain yang mewajibkan adanya persaksian dalam talak dan merupakan syarat sah talak. Pelaksanaan talak di Pengadilan Agama adalah untuk mempersulit terjadinya perceraian, pentingnya untuk menghimpun putusan-putusan dan pencatatan perceraian. Dalam hal Proses penyelesaian talak yang sudah terjadi di luar sidang Pengadilan Agama, di sini terjadi pengulangan lafaz talak (lafaz talak yang terjadi di luar sidang Pengadilan Agama dan lafaz talak yang diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama). Dengan melihat keseluruhan dalil yang disebutkan, tanpa mengurangi rasa hormat atas pendapat para ulama yang lain, menurut penulis, lafaz talak yang diucapkan suami di depan sidang Pengadilan Agama ketika isteri masih berada dalam masa iddah, talaknya tidak di hitung/tidak jatuh, apabila lafaz talak yang diucapkan di Pengadilan Agama tersebut setelah habis masa 'iddah, maka talaknya juga tidak jatuh/tidak di hitung (karena talak hanya ada dalam ikatan suami isteri), dan jika talak yang diucapkan di depan Pengadilan Agama tersebut setelah suami rujuk maka talaknya jatuh/dihitung.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

مد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, اللهم صل وسلم على محمد وعلى
آله وأصحابه أجمعين, أما بعد.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, rasa puji dan syukur yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, sumber segala inspirasi, yang telah menuntun penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, rahmat dan inayahnya tidak pernah luput dalam setiap detik kehidupan kita. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan alam, Nabi Muhammad SAW, perjuangannya bersama keluarga dan para sahabatnya telah mengantarkan kita menuju dunia yang penuh peradaban dan kasih sayang. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul **“PROSES PENYELESAIAN TALAK YANG SUDAH TERJADI DI LUAR SIDANG PENGADILAN AGAMA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I B Bangkinang)”**, hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi tugas dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Syari’ah (S.Sy) pada jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan yang dengan tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Keluarga tercinta, Ayahanda (BAHARUDIN M. ZEN) dan Ibunda tercinta (YUSLINAR) yang mempunyai samudera kasih sayang yang begitu luas dan tak pernah kering terhadap ananda, darah mu yang mengalir dalam tubuh ananda takkan ananda sia-siakan untuk terus mengukir peradaban dunia ini, senyumanmu adalah kebahagiaan ananda dan membahagiakanmu adalah cita-cita terbesar ananda. Uhibbuka ayah,, maa,, semoga Allah swt jadikan ananda jembatan untuk terus mengalirkan amal kebaikan bagi mu, semua jerih payahmu telah engkau perlihatkan dengan membiayai ananda dalam menuntut ilmu. Kepada abang dan adik tercinta (Abang Elwin Saputra dan Adek Mesta Aprina tersayang) yang telah menjaga ayah dan bunda dengan baik. Mamak Yulizar (Alm) yang selalu memberikan pandangan yang luar biasa dan membantu biaya ketika ananda masih sekolah akan selalu ananda ingat, semoga engkau ditempatkan ditempat yang sebaik-baiknya. Amiin ya robbal ‘alamiin.
2. Bapak Prof. DR. H. M. Nazir Karim, MA., Rektor UIN SUSKA Riau dan begitu juga untuk Pembantu-Pembantu Rektor UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Perguruan Tinggi ini.
3. Bapak DR. H. Akbarizan, MA, M.Pd., Dekan Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum dan begitu juga untuk Pembantu-Pembantu Dekan Fakultas Syari’ah dan Ilmu

Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan penulis.

4. Bapak Drs. Yusran Sabili, MA dan Zainal Arifin, MA., sebagai Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan sampai pada selesainya skripsi ini.
5. Ibu Jumni Nelly, MA yang telah membimbing dan meluangkan waktunya dalam mengoreksi dan memberikan arahan demi penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT melipatgandakan pahala beliau dan menjadi amal jariyah. Amiin Ya Robbal ‘Alamiin.
6. Bapak Khairul Amri, M.Ag sebagai Penasehat Akademis penulis yang telah memberikan arahan-arahan dan motivasi kepada penulis dalam mengikuti proses perkuliahan di UIN SUSKA Riau ini dari awal hingga akhir penyelesaian studi sarjana ini.
7. Bapak/Ibu Dosen dan civitas Akademika Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis untuk menjadikan mahasiswa yang intelek.
8. Pihak Pengadilan Agama Bangkinang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian, Bapak Izar.A.Md.,SH selaku Panitera yang sangat membantu penulis dalam memenuhi data-data yang dibutuhkan.
9. Untuk teman-temanku seperjuangan lokal AH angkatan 2007; Jiwandi, Helma, aciok Devi, Hendra, Ridwan Lelek, Mirwan, dll (*Sorry broo ngak sempat nulis satu persatu,,*). *Mo’yan-mo’yan den*, ocu zul, ocu yayan, cu itam (cu irul), cu Firman , Rino

(*thank's sob,,*). Kemudian khususan kepada Mimi K@rtini yang selalu mendukung dan memberi semangat dan memperingatkan untuk menyelesaikan skripsi ini ketika sibuk-sibuknya kerja. *Thak's Love!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini ke depan, atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, Maret 2012

Penulis

ADE SAPUTRA
NIM. 10721000040

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan.....	8
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Pengadilan Agama Kelas 1. B Bangkinang	13
B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang.....	18
C. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang.....	23
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK DALAM ISLAM	
A. Pengertian Talak.....	29
B. Penyebab Terjadinya Talak	33
C. Hukum Menjatuhkan Talak.....	45
D. Rukun Talak dan Syarat-syarat Talak	48

**BAB IV PROSES PENYELESAIAN TALAK YANG SUDAH TERJADI
DI LUAR SIDANG PENGADILAN AGAMA DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM**

A. Pelaksanaan Talak di Pengadilan Agama Bangkinang.....	55
B. Proses Penyelesaian Talak di Pengadilan Agama Bangkinang Terhadap Talak yang Terjadi diluar Sidang Pengadilan Agama.....	84
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Penyelesaian Talak yang Sudah Terjadi di luar Sidang Pengadilan Agama.....	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	109
B. Saran	110

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang	15
2. Daftar Nama Wakil Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang	16
3. Daftar Panitera Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang.....	17
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama kelas 1. B Bangkinang.....	21

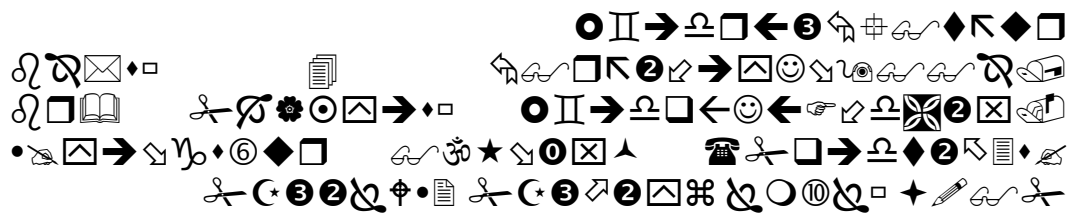
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Azza wa Jalla mensyari'atkan pernikahan untuk mencapai tujuan yang luhur dan suci. Tujuan ini tidak mungkin tercapai, kecuali bila tercipta pergaulan yang baik antara suami isteri dan adanya sifat saling mengikat batin antara satu dan lainnya. Untuk membina hubungan baik tersebut, Allah SWT memagari benteng yang teguh serta dapat mencegahnya dari kelemahan dan kehancuran. Salah satu caranya dengan memerintahkan seseorang yang berpengaruh, seandainya mereka mengkhawatirkan terjadinya *syiqaq* antara suami isteri untuk mendamaikan keduanya dan memberikan petunjuk agar tidak dipengaruhi oleh amarah dan kebencian¹ serta menghindari perceraian.

Allah SWT berfirman dalam Al- Qur'an surat Annisa': 19



Artinya: “Dan pergaulah mereka dengan baik, maka bila kamu tidak menyukai

mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai

*sesuatu, padahal allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.*²

Dengan demikian, kepada suami diajarkan untuk mempergauli isterinya dengan baik dan menghindarkan diri dari menceraikan isteri serta membenci talak.

¹ Mahmud Syaltuth, *Fiqih Tujuh Mazhab*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000) h. 146-147

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 80

Ibnu Umar meriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال
(رواه ابو داود و ابن ماجه, وصححه الحاكم, رساله)

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: perkara halal yang paling di benci Allah adalah Talak” (HR. Abu Daud, dan Ibnu Majah. Hadis ini dishahihkan oleh Al-Hakim, namun Abu Hatim mentarjihnya sebagai hadis mursal).³

Talak secara etimologi berarti melepaskan ikatan dan membebaskan belenggu; didevirasi dari kata **”ithlaq”** yang berarti melepaskan dan meninggalkan.

Dalam terminologi syari’at, cerai adalah melepaskan ikatan nikah dengan lafaz cerai atau sejenisnya, atau melepas jalinan pernikahan dalam waktu seketika (talak Ba’in) atau dalam waktu mendatang (setelah ‘iddah talak raj’i) dengan lafaz yang spesifik.⁴

Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan lebih lanjut bahwa, yang dimaksud dengan hilangnya ikatan pernikahan ialah mengangkat ikatan pernikahan itu sehingga tidak lagi isteri itu halal bagi suaminya (dalam hal ini kalau terjadi talak tiga).⁵

³ Muhammad Muhyi Addin ‘Abdu Al-Hamid, *Sunan Abi Daud*, (tt: Darul Fikr, th), 2178, jilid I, h. 661, Mahmud Khalil, *Sunan Ibnu Majah*, (tt: Maktabah Abi Al-Ma’athy, th), 2018, Jilid 3, h. 180

⁴ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid 3, h. 361

⁵ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), h. 135

Allah SWT telah memberikan kepada suami hak untuk menceraikan isterinya, jika suami mendapati hal-hal yang mendorongnya untuk melakukan hal itu, dengan ungkapan dan keinginannya yang dikhususkan (untuk berpisah).

Allah SWT tidak menyerahkan hak talak ditangan isteri, walaupun isteri bersyariat dalam akad, demi menjaga kelangsungan pernikahan dan menghindari hal-hal yang dapat memupuskannya dengan segera. Biasanya laki-laki lebih banyak perhitungannya dalam memutuskan suatu perkara dan lebih jauh dari sikap ngawur dalam perbuatan. Bisa jadi isteri menjatuhkan talak jika memiliki kuasa untuk melakukannya karena sebab-sebab yang sepele.

Oleh karena itu, wanita tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan talak karena sedemikian cepat terpengaruh perasaan dan emosinya.⁶ Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan: yang menjatuhkan talak adalah laki-laki. Sedangkan Hanafi berpendapat yang menjatuhkan talak adalah perempuan.⁷ Fuqaha sependapat bahwa orang yang boleh menjatuhkan talak adalah suami yang berakal, dewasa, dan merdeka, yakni tidak dipaksa.⁸

Lafaz cerai yang tegas tidak membutuhkan niat, bahkan dianggap jatuh meskipun tidak sengaja tanpa ada perbedaan pendapat mengenainya.⁹ Seandainya suami bermaksud bercanda atau main-main maka talaknya tetap jatuh. Rasulullah SAW bersabda:

⁶ Abu Malik Kamal bin as- Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006), jilid 4, h. 318

⁷ Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2010), h. 366

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mijtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), jilid 2, h. 583

⁹ Amru Abdul Mun'im Salim, *Fikih Talak Berdasarkan Al- Qur'an & Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 125

diamandemen menjadi UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama¹³ menyatakan bahwa; *“perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”*.¹⁴

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 pasal 18 menyatakan *“perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan”*.¹⁵

Pasal diatas menjelaskan bahwa, perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan. Dalam pelaksanaannya, undang- undang perkawinan No. 1 tahun 1974 ini belum sepenuhnya di jalankan oleh masyarakat. Ada yang telah melaksanakan cerai talak di Pengadilan Agama, tapi setelah mereka mengucapkan lafaz talak di luar sidang Pengadilan Agama.

Seperti pengakuan HM dengan register perkara No. 52/Pdt.G/2009/PA.Bkn, yang menceraikan isterinya pada saat kasusnya di bawa ke Pengadilan Agama Bangkinang; *“sebelumnya saya telah menceraikan isteri saya di rumah, ketika itu saya baru pulang kerja dari Lipat Kain untuk memasang tenda, kemudian saya pulang kerumah untuk mengganti pakaian untuk shalat jum’at, akan tetapi isteri saya tidak mau membuka pintu kamar karena saya sudah tidak tahan lagi melihat perangnya akhirnya saya mengucapkan lafaz*

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 5

¹⁴ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 530, UURI. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h. 93, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: FokusMedia, 2005), h. 38, Undang- undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (Medan: Duta Karya, 1995), h. 21

¹⁵ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, *op.cit*, h. 551

talak kepada isteri saya. Sebelumnya kami juga pernah bertengkar karena isteri saya juga tidak mau membuka pintu rumah padahal waktu itu saya sangat capek pulang dari kerja memuat barang dagangan milik orang lain sekitar jam 9 malam, akhirnya saya harus numpang tidur dirumah teman saya. Pada saat saya sidang di Pengadilan Agama Bangkinang saya kembali mengucapkan lafaz talak”¹⁶.

Demikian juga yang di tuturkan oleh SY dengan Register Perkara No. 10/Pdt.G/2011/PA.Bkn yang telah menceraikan isterinya di rumah : *“saya mengucapkan lafaz talak kepada isteri saya ketika itu terjadi pertengkaran pada sore hari karena dia selalu main- main volly tiap sore, dia tidak mempedulikan rumah tangga dan bahkan dia juga selingkuh dan menurut tetangga dia sering membawa laki-laki lain kerumah di saat saya tidak di rumah. Saya juga sudah menasehatinya tetapi setiap kali saya nasehati, dia selalu melawan dan berkilah. Pada saat sidang di Pengadilan Agama saya juga mengucapkan lafaz talak”¹⁷.*

Berdasarkan kasus diatas, dapat kita pahami bahwa terjadi pengulangan lafaz talak yakni lafaz talak yang di ucapkan di luar sidang Pengadilan Agama Bangkinang dan pada saat sidang di Pengadilan Agama Bangkinang. Pengulangan lafaz talak yang penulis maksudkan disini ialah lafaz talak yang di ucapkan oleh seorang suami kepada isterinya di luar sidang Pengadilan Agama dan mengucapkan kembali lafaz talak di depan Sidang Pengadilan Agama ketika membawa kasusnya ke Pengadilan Agama.

Secara agama Islam, lafaz talak yang diucapkan diluar sidang Pengadilan Agama sudah sah, namun Undang-undang belum mengakui talak seperti itu karena belum tercatat di Pengadilan Agama atau belum mendapatkan bukti cerai (surat cerai). Untuk mendapatkan surat cerai mereka harus mengajukan permohonan cerai dan melaksanakan perceraian dipengadilan Agama.

¹⁶ HM (salah seorang Pemohon yang menceraikan isterinya di luar sidang Pengadilan Agama Bangkinang), *Wawancara*, Desa Naumbai, 4 September 2011

¹⁷ SY (salah seorang pemohon yang menceraikan isterinya di luar sidang Pengadilan Agama), *Wawancara*, Koto Perambahan, 12 September 2011

Karena masih ada di antara para suami yang mengucapkan lafaz talak kepada isterinya di luar sidang Pengadilan Agama dan kembali melakukan pengucapan lafaz talak pada saat kasusnya dibawa ke Pengadilan Agama, oleh sebab itu penulis tertarik untuk meninjau lebih mendalam tentang Proses penyelesaian talak seperti ini.

Akhirnya, dari uraian diatas, dapat diambil permasalahan yang dapat diangkat menjadi sebuah skripsi sebagai karya ilmiah dengan judul : "**PROSES PENYELESAIAN TALAK YANG SUDAH TERJADI DI LUAR SIDANG PENGADILAN AGAMA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I B Bangkinang)**".

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis membatasi masalah dalam kajian ilmiah ini agar tidak terjadi penyimpangan yang jauh dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi penelitian Proses Penyelesaian Talak yang Sudah terjadi di luar Sidang Pengadilan Agama ditinjau menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang) yang dihitung dari awal Januari 2009 sampai akhir bulan Juni 2011.

C. Perumusan Masalah

Sebagaimana diutarakan dalam latar belakang masalah penulisan skripsi ini, maka permasalahan yang diteliti adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan talak di Pengadilan Agama Bangkinang?
2. Bagaimana proses penyelesaian talak di Pengadilan Agama Bangkinang terhadap talak yang terjadi di luar sidang Pengadilan Agama?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses penyelesaian talak yang sudah terjadi di luar sidang Pengadilan Agama?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan talak di Pengadilan Agama Bangkinang.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian talak jika telah terjadi talak diluar sidang Pengadilan Agama Bangkinang.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Proses Penyelesaian talak yang sudah terjadi di luar sidang Pengadilan Agama.

b. Kegunaan Penelitian

1. Menambah wawasan bagi penulis dalam mengetahui, membahas serta menetapkan hukum terhadap suatu fakta atau kenyataan.
2. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Sebagai sumbangan terhadap ilmu pengetahuan umumnya, ilmu syari'ah khususnya, yang sekaligus ikut andil dalam melengkapi bahan rujukan yang berhubungan dengan Hukum Islam.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi Penelitian ini adalah Pengadilan Agama Bangkinang yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman NO. 99 Bangkinang.

Dipilihnya lokasi ini sebagai tempat penelitian karena Pengadilan Agama adalah tempat untuk menyelesaikan kasus dan tempat pelaksanaan perceraian melalui sidang Pengadilan Agama.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pasangan suami isteri yang melakukan cerai talak di luar sidang Pengadilan Agama, sedangkan yang menjadi objeknya adalah Proses penyelesaian talak yang sudah terjadi di luar sidang Pengadilan Agama.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu pasangan suami isteri yang melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan Agama Bangkinang. Karena populasinya tidak begitu diketahui, maka dalam tulisan ini penulis mengambil sampel 3 pasangan suami isteri dengan menggunakan teknik *total sampling*.

4. Sumber Data

Sumber data terdiri dari dua sumber yaitu:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari pasangan suami isteri yang sudah melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan Agama.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari Hakim Pengadilan Agama Bangkinang, Panitera Pengadilan Agama Bangkinang, surat putusan Pengadilan Agama Bangkinang dan data yang di peroleh dari bahan referensi atau perpustakaan yang ada kelerasinya dengan judul penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*Field Research*) maka pengumpulan data melalui:

- a. Observasi yaitu penulis langsung ke lapangan untuk mengamati secara langsung tentang masalah yang di teliti.
- b. Wawancara yaitu teknik yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab terhadap sumber data yang berhubungan dengan penelitian ini secara langsung.
- c. Conten analisis, yakni suatu analisis data atau pengolahan secara ilmiah tentang isi dari sebuah pesan suatu komunikasi. Metode ini penulis pergunakan untuk menganalisis data yang telah disajikan, yang akhirnya terdapat suatu kesimpulan

6. Metode Penulisan

Setelah data-data diperoleh baik melalui observasi maupun wawancara, kemudian data tersebut disusun dengan menggunakan metode:

- a. Metode deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan masalah-masalah yang dibahas sesuai dengan data yang terkumpul kemudian menganalisa data tersebut dan membahas sehingga menghasilkan hukum menurut Agama Islam.
- b. Metode deduktif yaitu menggambarkan kaidah yang umum kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Metode induktif yaitu menggambarkan data-data khusus, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

7. Metode Analisa Data

Penelitian ini akan meneliti tentang Proses penyelesaian talak yang sudah terjadi di luar sidang Pengadilan Agama ditinjau menurut Hukum Islam, maka untuk menganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan pendekatan analisa kualitatif, yaitu setelah data tersebut terkumpul melalui observasi dan wawancara, penulis mengklarifikasikan melalui kategori atas dasar persamaan data tersebut, antara satu data dengan yang lainnya dihubungkan dan dibandingkan, kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitik.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih terarah, maka penulis mengemukakan garis-garis besar pembahasan yang terdiri dari beberapa bab:

- Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II : Gambaran umum tentang lokasi penelitian yang terdiri dari: sejarah Pengadilan Agama Bangkinang, struktur organisasi Pengadilan Agama, kedudukan dan wewenang Pengadilan Agama Bangkinang.
- Bab III : Tinjauan umum tentang talak dalam Islam yang terdiri dari: pengertian perceraian, penyebab terjadinya perceraian, hukum menjatuhkan talak, rukun talak dan syarat-syarat talak.

Bab IV : Proses penyelesaian talak yang sudah terjadi di luar sidang Pengadilan Agama ditinjau menurut hukum Islam yang terdiri dari; pelaksanaan talak di Pengadilan Agama Bangkinang, proses penyelesaian talak di Pengadilan Agama Bangkinang terhadap talak yang terjadi diluar sidang Pengadilan Agama, tinjauan hukum Islam terhadap Proses penyelesaian talak yang sudah terjadi di luar sidang Pengadilan Agama.

Bab V : Kesimpulan, dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Pengadilan Agama Kelas 1. B Bangkinang

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura (Lembaga Negara Tahun 1957 Nomor 99) dasar berdirinya Pengadilan Agama Bangkinang.

Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang berdiri pada tanggal 5 Mei – 1960 sebagai realisasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 yang berkedudukan di Bangkinang.¹

Jika kita melihat pada sejarah lahirnya Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang ini erat hubungannya dengan sejarah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Penetapan Bangkinang sebagai ibu kota Kabupaten didasarkan pada Undang-undang Nomor 12 tahun 1956. Sedangkan pada saat berdirinya Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang ibu kota Kabupaten Kampar masih berkedudukan di Pekanbaru dan barulah pada tanggal 5 Juni 1967 pemindahan ibu kota Kabupaten Kampar dari Pekanbaru ke Bangkinang dengan dipimpin oleh seorang bupati bernama Kolonel R. Soebrantas.

Pada saat berdirinya Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang tepatnya tanggal 5 Mei 1960, Ketua Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang dirangkap

¹ Izar. A. Md., SH, (Panitera Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang), *Wawancara*, Di Bangkinang: 02 Nopember 2011

oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu Bapak KH. ABD. MALIK dan dua orang Karyawan pada waktu itu masing-masing:

1. ABBAS HASAN

2. ABD. RAHMAN RASYID.²

Walaupun personil Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang waktu itu sangat minim sekali ditambah dengan sarana Gedung belum serta sarana administrasi sangat kurang sekali, namun Pengadilan Agama terus maju dan berlanjut dengan fungsinya sebagai sebuah badan Pengadilan Agama yang pada saat itu berada di bawah departemen Agama Republik Indonesia.

Sejak itu pulalah (*tanggal 5 Juni 1967*), semua Instansi pemerintah Daerah tingkat II Kabupaten Kampar (*sebutan sebelum keluarnya undang-Undang no 32 Tentang Otonomi Daerah*) sudah dapat berkantor di Bangkinang, walaupun waktu itu sarana perkantoran masih belum lengkap.

Pada saat terbentuknya Pengadilan Agama Bangkinang, seluruh Pengadilan Agama di wilayah Riau termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang, dan baru pada tahun 1987 Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terbentuk dan sejak itu Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

² Buku Profil dan Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang, 2011, h. 1

Selama dalam sejarah perjalanan Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang sejak awal hingga saat ini telah mengalami beberapa kali pergantian pimpinan. Adapun pimpinan Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang sejak pertama berdiri hingga sekarang dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II. 1

Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang

NO	NAMA	TAHUN MEMIMPIN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	KH. Abdul Malik	1958-1969	Pensiun
2.	Drs. H. Abdul Abbas	1969-1974	Pensiun
3.	H. Mhd. Zen Wahidy	1974-1978	Pensiun
4.	Drs. Idris	1978-1994	Pensiun
5.	Drs.H.Syahril,SH., MH	1994-2001	Hakim Tinggi PTA Pekanbaru
6.	Drs. Taslim	2001-2003	Hakim Tinggi PTA Pekanbaru
7.	Drs. Syahril, MH	2003-2006	Hakim Tinggi PTA Pekanbaru
8.	Drs. A. Bahri Adnan	2006-2009	Hakim Tinggi PTA Mataram
9.	Drs. H. Sudirman, MH	2009-2011	Mutasi
10.	Drs.H. Amridal,SH., MH	2012-sekarang	Masih aktif

Sumber Arsip: Kepegawaian Pengadilan Agama Bangkinang

Dari sepuluh pergantian pimpinan sebagaimana pada tabel di atas, baru pada tahun 2003 Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang memiliki wakil ketua sedangkan sebelumnya jabatan wakil tidak pernah ada bahkan pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2001 jabatan ketua dipegang oleh wakil yang pada waktu itu jabatan ketua disebut dengan PYMT (*Pejabat Yang Melaksanakan Tugas*) yang berjalan lebih kurang 7 tahun, artinya Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang di kendalikan oleh seorang wakil ketua tanpa ketua yang defenitif. Adapun nama-nama pejabat yang pernah menduduki jabatan wakil ketua di Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang Adalah :

TABEL II. 2

Daftar Nama Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang

No	NAMA	TAHUN MENJABAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Drs. Syahril.SH.,MH	1994 s/d 2001	PYMT/HT. PTA.Pekanbaru
2	Drs. Masnur Yusuf.SH.,MH	2001 s/d 2007	Ketua PA. Tembilahan
3	Drs.H. Sudirman,MH	2007 s/d 2008	Ketua PA Kelas I.B Bangkinang
4	Drs. H. Fuizalman.SH.,MH	2009 s/d sekarang	Mutasi dari Hakim Senior PA. Jakarta Selatan

Sumber Arsip: Kepegawaian Pengadilan Agama Bangkinang

Disamping dua jabatan pimpinan tersebut diatas untuk lancarnya administrasi peradilan dan administrasi umum pada Pengadilan Agama Bangkinang dibantu oleh panitera yang sejak berdirinya hingga hingga sekarang telah terjadi pergantian panitera sebanyak 5 kali. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel II. 3 berikut ini :

TABEL II. 3

Daftar Panitera Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang

No	NAMA	TAHUN MENJABAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1	ABD. RAHMAN RASYID	1967 s/d 1981	Pensiun/Alm
2	RASJID,BA	1981 s/d 2000	Pensiun
3	Drs. MARDANIS.SH.,MH	2000 s/d 2001	Hakim PA Kelas I.B Bangkinang
4	ZULHERMIS,SH	2001 s/d 2005	Pensiun
5	NASRI ALAMSA,SH	2005 s/d sekarang	Masih aktif

Sumber Arsip: Kepegawaian Pengadilan Agama Bangkinang

Seiring perkembangan zaman dari tahun ketahun Pengadilan Agama Bangkinang terus mengalami Perkembangan yang semula dari tidak memiliki gedung hingga telah memiliki gedung.³

Sejalan dengan lahirnya Undang-Undang nomor 32 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah menyebabkan wilayah Kabupaten Kampar dibagi menjadi dua

³ *Ibid*, h. 4

Kabupaten yaitu Kabupaten induk yang berpusat di Bangkinang dan Kabupaten Pelalawan yang beribukota di Pangkalan Kerinci. Sehingga dengan pemekaran kabupaten Kampar, berakibat pula berkurangnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkinang karena di Pangkalan Kerinci berdiri pula Pengadilan agama dengan nama Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.

Pada tahun 2004 Pengadilan Agama Bangkinang mendapat bantuan rehab fisik bangunan gedung dari pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Sejalan dengan peningkatan jumlah perkara maka pimpinan Pengadilan Agama bangkinang terus melakukan pembenahan dengan mengajukan usulan kenaikan kelas dari kelas dua menjadi kelas satu, dan usaha ini berhasil dengan terbitnya surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 dan kenaikan kelas tersebut telah di resmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 05 Agustus 2009 dan sejak itulah segala yang berkenaan dengan administrasi telah menggunakan kop resmi Peradilan Agama Kelas I. B Bangkinang.⁴

B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang

Susunan organisasi Pengadilan Agama Kelas 1. B Bangkinang di lihat dari tugas dan jabatan sesuai dengan surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 05 tahun 1996 adalah sebagai berikut:

I. **Ketua** : Drs. H. Amridal, SH., MH⁵

⁴ *Ibid*, h. 5

⁵ Izar. A. Md., SH, (Panitera Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang), *op.cit*

- II. ***Wakil Ketua*** : Drs. H. Fuizalman, SH., MH
- III. ***Hakim*** : 1. Dra. Nurzauti, Sh., MH
 2. Dra. Hasnidar, MH
 3. Drs. Ubaidullah Harun
 4. Dr. Erina
 5. Drs. M. Zen, SH., MH
 6. Drs. Nursolihin, MH
 7. Drs. Mohd. Yusuf
 8. Dra. Siti Khadijah
- IV. ***Panitera Sekretaris*** : Nasri Alamsa, SH
- V. ***Wakil Panitera*** : Sudirman, SH
1. Panitera Muda Gugatan : *(belum terisi sejak 06 oktober 2008)*
2. Panitera Muda Permohonan: Zulfazni, SH
3. Panitera Muda Hukum : Izar, A. Md., SH
- VI. ***Wakil Sekretaris*** : Ramlis, SH
1. Kasubag Kepegawaian : *(tidak terisi terhitung 30 Desember 2010)*
2. Kasubag Keuangan : Siti Sahlaini Army, S. Ag., SH
3. Kasubag Umum : Drs. Sinar
- VII. ***Panitera Pengganti*** : 1. Siti Rusani. Y. BA
 2. Warnis
 3. Netti Adha, SH
 4. Drs. M. Nasir AS, SH
 5. Idris, SH

6. Zuriati, S. Ag

7. Liza Fajriati Hutabarat, SH

VIII. ***Jurusita***

: 1. Misnuri

2. Zainal Abidin

3. Mulyadi

IX. ***Jurusita Pengganti***

: 1. Nasir

2. Rahmi, BA

3. Nurbaiti

4. Ronni⁶

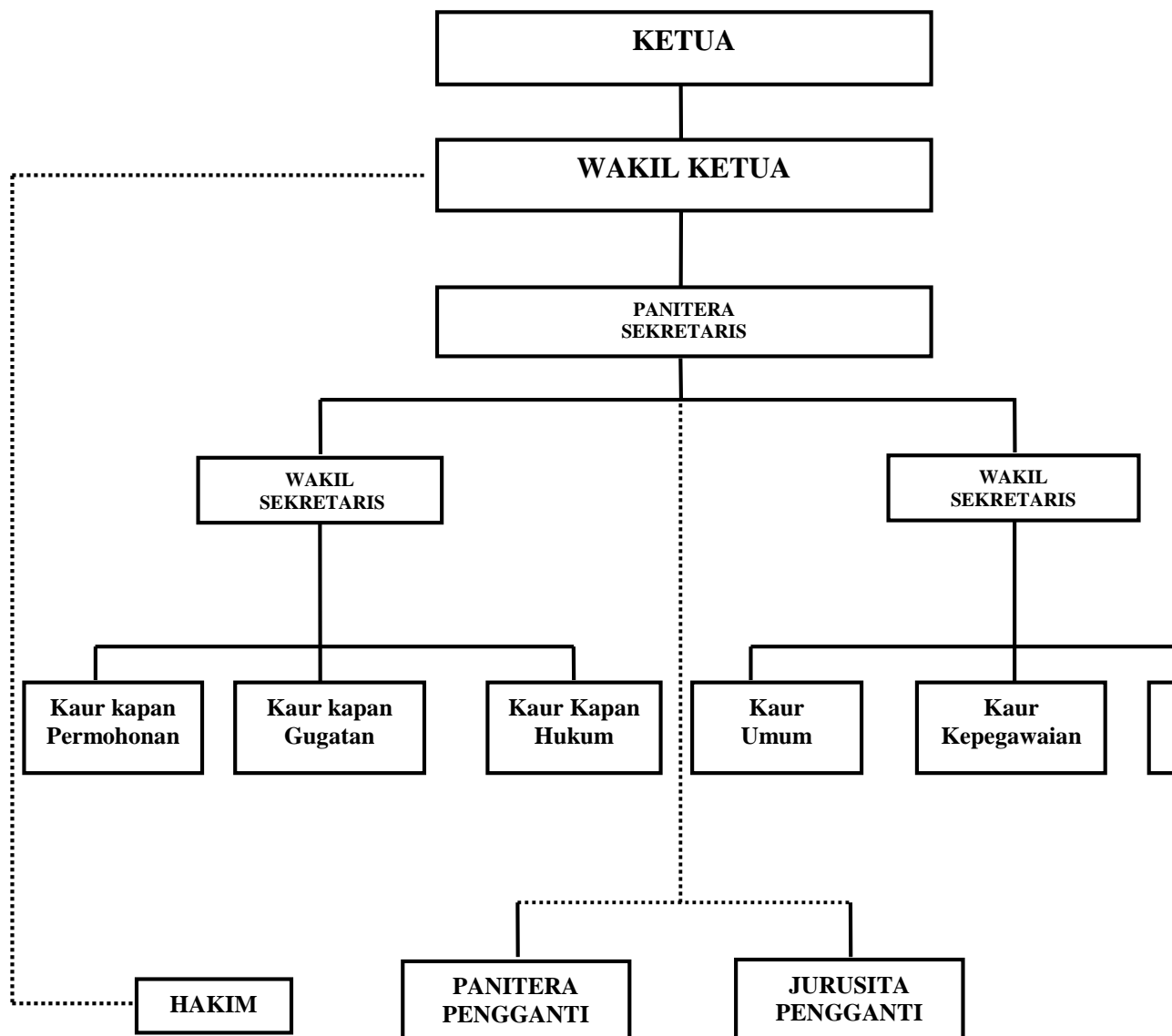
Pengadilan Agama Bangkinang sebagai bagian tak terpisahkan dari lembaga Peradilan Negeri, Khususnya Pengadilan Agama, maka secara organisatoru dan manegerialnya melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku, pada pokoknya antara lain tentang UU Peradilan Agama No. 7 tahun 1989 bab II tentang susunan Pengadilan pada sebuah Peradilan Agama⁷ yang telah diamandemen menjadi UU No. 3 tahun 2006.

⁶ Buku Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang, *op.cit*, h. 21-22

⁷ Dra. Hasnidar, MH (Hakim Pengadilan Agama Bangkinang), *Wawancara*, Pengadilan Agama Bangkinang, 19 Januari 2012

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA

KELAS I. B BANGKINANG



Sumber Arsip: *Papan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkinang*, 2012

Secara garis besar penjelasan bagian-bagian tersebut adalah:

- a. Garis putus-putus sebagai tanda fungsional organisasi Pengadilan Agama Bangkinang, bagan hakim, penitera pengganti dan juru sita pengganti adalah pejabat fungsional dari sub organisasi fungsional Pengadilan Agama Bangkinang yang berwenang dan berfungsi dalam melaksanakan tugas pokok peradilan
- b. Garis lurus sebagai tanda garis struktural organisasi Pengadilan Agama Bangkinang yang merupakan pendukung umum seluruh organisasi, sekalipun tidak terkait langsung dengan fungsi pokok Peradilan Agama.
- c. Bagan dibawah panitera dan wakil panitera yaitu kaur kapan permohonan, kaur kapan gugatan, kaur kapan hukum adalah pejabat struktural Pengadilan Agama Bangkinang yang terkait langsung dalam menunjang tugas pejabat fungsional dalam menjalankan tugas pokok peradilan.

Ketua Pengadilan Agama adalah sebagai kepala administrasi dalam peradilan. Ketua pengadilan dibantu oleh kepala kepaniteraan sebagai penanggung jawab pelaksana administrasi umum dan perkara serta bendahara yang ada dipengadilan tersebut. Dalam pelaksanaan administrasi umum dibantu oleh kepala kepaniteraan perkara.⁸

Dibidang ketua Pengadilan dibantu oleh seorang wakil ketua dan beberapa orang hakim, khususnya di Pengadilan Agama Bangkinang ada 9 (sembilan) orang hakim termasuk ketua pengadilan. Apabila ketua pengadilan

⁸ Nasri Alamsa, SH, (Panitera Pengadilan Agama Bangkinang), *Wawancara*, Bangkinang, 26 Januari 2012

bertugas keluar daerah atau keluar kota, ketua pengadilan Agama melimpahkan tugas-tugasnya kepada wakil ketua Pengadilan.

Kepala pengadilan sebagai administrator pengadilan berwenang menentukan biaya perkara dipengadilan Agama Bangkinang, menentukan hakim yang akan menyidangkan perkara-perkara di Pengadilan Agama Bangkinang serta untuk menentukan majelisnya didasarkan kepada senioritas, kepangkatan dan pengalamannya.

Majelis hakim yang telah mendapatkan penetapan untuk memeriksa perkara kekuatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak manapun, hakim mempunyai hak prerogatif penuh untuk menentukan perkara yang ditanganinya dan ketua pengadilan secara langsung tidak dapat mengawasi maupun menindak hakim jika ada tunggakan perkara.⁹

C. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang

Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang diatur dan diakui keberadaannya oleh Undang-Undang. Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama yang berwenang mengadili sebagian perkara perdata yang timbul dan diajukan oleh mereka yang beragama Islam dan warga negara Indonesia. Selain itu Pengadilan Agama juga merupakan sebagian dari Pengadilan Perdata yang khusus menyelesaikan masalah ahwalu al-syakhshiyyah, namun operasionalnya tidak terlepas dari pemakaian hukum acara perdata secara umum.

⁹ Dra. Hasnidar, MH (Hakim Pengadilan Agama Bangkinang), *op.cit*

Mengenai kedudukannya Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kotamadya atau ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten tersebut. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota propinsi yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah propinsi itu. penjelasan mengenai hal ini terdapat dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989/ UU No. 3 tahun 2006. Dalam ayat (1) dijelaskan: “Pengadilan Agama berkedudukan di kota madya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten”. Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan: “Bahwa Pengadilan tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi”.¹⁰

Kekuasaan kehakiman ketentuannya diatur dalam undang-undang tahun 1970, Undang- undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang- undang No. 14 tahun 1970 merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta azas- azas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha, sedangkan masing-masing peradilan masih diatur dalam Undang-undang tersendiri.¹¹

Adapun wewenang mengadili berdasarkan yurisdiksi (wilayah hukum), Pengadilan Agama Bangkinang pada mulanya memiliki wilayah hukum seluas

¹⁰ Undang- undang RI No. 7 tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*, (Surabaya: Pengadilan Tinggi Agama, 1992), h. 296

¹¹ Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 26

2.829.186 Km yang meliputi 15 kecamatan yang ada dalam daerah tingkat II kabupaten Kampar. Tetapi semenjak terbentuknya Pengadilan Agama Pasir Pengarayan pada tahun 1976 maka wilayah hukum pengadilan Agama Bangkinang berkurang menjadi 9 kecamatan dalam wilayah tingkat II kabupaten Kampar, yaitu:¹²

1. kecamatan XIII Koto Kampar dengan Ibu Kota Batu Bersurat
2. Kec. Bangkinang dengan Ibu kota Bangkinang, sekaligus merupakan Ibu kota Kabupaten daerah Tingkat II Kampar.
3. Kec. Kampar dengan Ibu kota Air Tiris
4. Kec. Siak Hulu dengan Ibu kota Simpang Tiga
5. Kec. Langgam dengan Ibu kota Langgam
6. Kec. Bunut dengan Ibu kota Pangkalan Bunut
7. Kec. Pangkalan Kuras dengan Ibu kota Sorek Satu
8. Kec. Kampar Kiri dengan Ibu kota Lipat Kain
9. Kec. Kuala Kampar dengan Ibu kota Teluk Dalam.

Namun karena adanya pemekaran wilayah, sampai tahun 2012 daerah tingkat II Kabupaten Kampar sudah berjumlah 20 Kecamatan dan berdasarkan hasil pemetaan penggunaan tanah kecamatan diseluruh Kabupaten kampar dengan luas 1.098.346 Ha, dengan luas sebagai berikut:

- 1) Tanah Perumahan : 1.085.738 Ha.
- 2) Persawahan : 12.608 Ha¹³

¹² Nasri Alamsa, SH (Panitera Pengadilan Agama Bangkinang), *op.cit*

¹³ Papan Wilayah Geografi dan Kewenangan Pengadilan Agama Bangkinang, 2011

1. Kecamatan Bangkinang
2. Kec. Kampar
3. Kec. Tambang
4. Kec. Bangkinang Barat
5. Kec. Bangkinang Seberang
6. Kec. Salo
7. Kec. Kampar Utara
8. Kec. Rumbio Jaya
9. Kec. Kampar Timur
10. Kec. Siak Hulu
11. Kec. XIII Koto Kampar
12. Kec. Kampar Kiri
13. Kec. Kampar Kiri Hilir
14. Kec. Kampar Kiri Hulu
15. Kec. Tapung
16. Kec. Tapung Hilir
17. Kec. Tapung Hulu
18. Kec. Kampar Kiri Tengah
19. Kec. Gunung Sahilan
20. Kec. Perhentian Raja.¹⁴

¹⁴ Izar. A. Md., SH, (Panitera Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang), *op.cit*

Dengan telah ditentukan wewenang bagi Pengadilan Agama Bangkinang, maka jelaslah bahwa Pengadilan Agama Bangkinang tidak berwewenang mengadili perkara-perkara yang berada diluar kewenangan absolut dan relatifnya.

Kekuasaan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis-jenis perkara atau jenis pengadilan maupun tingkat pengadilannya.

Dalam pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan menjadi UU No. 3 tahun 2006 menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwewenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam,
- c. Waqaf dan shadaqah.

Dalam pasal (2) nya dinyatakan: “Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku”. Sedangkan dalam ayat (3) dikatakan: “Dalam bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan harta peninggalan tersebut”.¹⁵

¹⁵ H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 29

Adapun yang dimaksud dengan kewenangan relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah.¹⁶ Kewenangan relatif Pengadilan Agama sesuai dengan tempat dan kedudukannya,¹⁷ seperti kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkat seperti Pengadilan Agama Bangkinang dan Pengadilan Agama Pasir Pengarayan. jadi, tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yurisdiksi relatif tertentu. Sedangkan kewenangan relatif Pengadilan Agama Provinsi adalah daerah hukum eks Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau. Oleh sebab itu apabila ada suatu pengadilan yang mengadili perkara di luar batas kewenangannya maka putusannya menjadi batal.

¹⁶ Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 11

¹⁷ *Ibid*

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK DALAM ISLAM

A. Pengertian Talak

Putusnya perkawinan akibat perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian, talak tebus atau khuluk, zihar, ila', li'an dan sebab-sebab lainnya.¹

Kata diambil dari kata yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Dari kata ini diambil kalimat yakni aku meninggalkan negara. Dikatakan untuk perempuan yang dicerai atau tetapi bacaan pertama lebih fasih. Dan bentuk *fi'il mudhari'* (kata kerja masa sekarang) untuk keduanya adalah **تطلق**.²

الطلاق وهو لغة حل القيد

Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan,³ atau معناه في اللغة حل القيد سواء كان حسيا كقيد الفرس وقيد الاسير أو معنويا كقيد النكاح “Talak menurut bahasa adalah membuka ikatan, baik ikatan nyata seperti ikatan kuda atau ikatan tawanan ataupun ikatan ma'nawi seperti nikah”.⁴

¹ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), h. 133

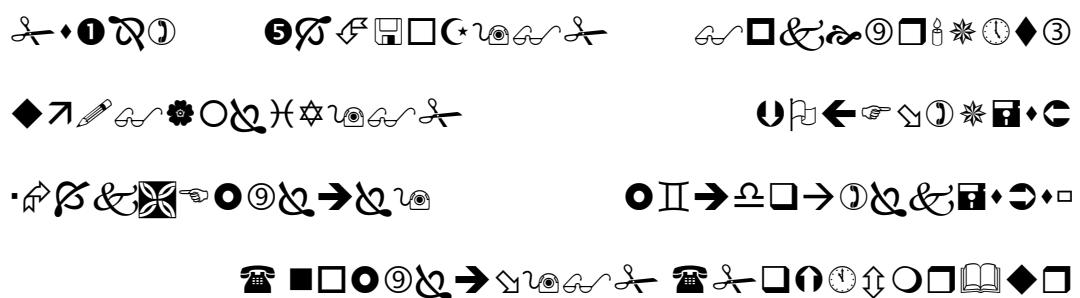
² Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), jilid 7, h. 267

³ Abu Bakar Syathan, *I'anatut Thalibin*, (Mekkah: Darul Ihyak Al- Kutub, th), Juz 4, h. 2

⁴ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, op.cit, h. 134-135

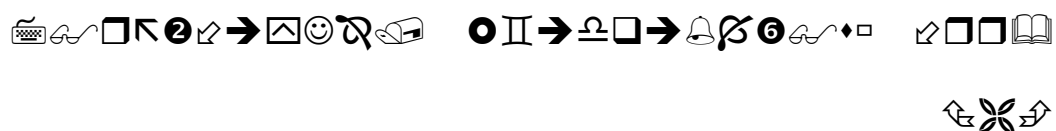
Secara umum perceraian diungkapkan dengan lafaz faraq yang berarti memutuskan ikatan perkawinan antara suami isteri dengan sebab-sebab tertentu.⁵ Dalam hukum Islam, lafaz perceraian diungkapkan dengan talak faraq maupun sirah. Ketiga lafaz ini dijumpai di dalam al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

1. Surat Al- Talak ayat (1)



Artinya: “*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)*”.⁶

2. Surat Ath- Talak ayat (2)



Artinya: “..... *atau lepaskanlah mereka dengan baik*”.⁷

3. Surat Al- Ahzab ayat (28)

⁵ Wahbah Al- Zuhaili, *Al-fiqh al- Islami Wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al- Fikr, 1989), h. 347

⁶ Departemen Agama RI, *Al- quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 558

⁷ *Ibid*



Artinya: “.... maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut’ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik”.⁸

Dalam kamus Marbawi, lafaz talak berasal dari bahasa Arab yaitu طلق – يطلق yang berarti perceraian.⁹

Secara etimologi, menurut Abdu al-Rahman al-Jaziri talak adalah sebagai berikut:

القيد سواء كان حسيا كقيد الفرس وقيد الأسير أو معنويا كقيد النكاح

Artinya: “Membuka atau melepaskan ikatan, baik secara nyata seperti melepaskan ikatan kuda atau ikatan orang yang tertawan, maupun secara maknawi, seperti membuka ikatan perkawinan”.

Sedangkan secara terminologi, para ulama mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan talak ialah:

1. Menurut Abdu al- Rahman al-Jaziri dalam kitabnya *al-fiqh ‘Ala Mazahibi al-Arba’ah* mengemukakan bahwa perceraian atau thalak adalah;

زالة النكاح رفع العقد بحيس لا تحل له

⁸ *Ibid*, h. 421

⁹ Idris Marbawi, *Kamus Marbawi*, (Bandung; al- Ma;arif, th), h. 364

Artinya: “menghilangkan ikatan perkawinan atau melonggarkan ikatannya dengan menggunakan lafaz tertentu, yaitu menghilangkan perkawinan dengan menanggalkan ikatan perkawinan, sehingga isteri tidak halal lagi bagi suaminya”.

2. Menurut Sayyid Sabiq, bahwa talak adalah sebagai berikut:

نهاء العلاقة الزوجية

Artinya: “Melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya ikatan perkawinan”.¹⁰

3. Menurut Jalaluddin al-Mahally, bahwa talak adalah sebagai berikut:

حل القيد النكاح بلفظ الطلاق أو تحوه

Artinya: “Membuka ikatan perkawinan dengan lafaz talak atau seumpamanya”.

4. Menurut mazhab Syafi’i bahwa talak atau perceraian adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan kata-kata lafaz yang menunjukkan talak (cerai).¹¹ Dalam kitab Hukum Islam, menurut fiqh, mazhab Syafi’i menyatakan bahwa sah hukumnya seorang suami menjatuhkan talak atau ucapan cerai kepada isterinya walaupun tanpa penyelesaian atau mengemukakan alasan.¹² Cerai dalam pengertian ini akan sangat mudah terjadi tanpa adanya pembelaan dari isteri.¹³

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: al- Ma’arif, 1990), Juz VIII, h. 9

¹¹ Idris Ahmad, *Fiqh Syafi’i*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), h. 385

¹² Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1992), h. 95

¹³ *Ibid*

5. Menurut Peunoh Daly, bahwa yang dimaksud dengan talak menurut istilah adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan lafaz atau yang seperti dengannya.¹⁴

6. Menurut Abu Zahrah, bahwa yang dimaksud dengan talak adalah:

رفع قيد النكاح في الحال أو في المال بلفظ مطلق من مادة الطلاق أو في معناها

Artinya: “*Menghilangkan ikatan perkawinan pada waktu itu atau waktu yang akan datang dengan menggunakan lafaz tertentu dari maksud kata talak atau dengan thalak tersebut*”.¹⁵

Berdasarkan beberapa defenisi yang di kemukakan di atas, maka dapatlah penulis simpulkan bahwa perceraian adalah memutuskan atau membubarkan perkawinan antara suami dan isteri dengan menggunakan kata talak atau kata-kata yang semakna dengannya.

B. Penyebab Terjadinya Talak

Dalam hukum Islam, Peceraian mempunyai beberapa bentuk dan penyebabnya tersendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Talak

Al-Hamdani mengatakan bahwa: “Perceraian dalam bentuk talak ini di sebabkan karena isteri sudah keterlaluan melanggar perintah Allah SWT. Memiliki kepribadian yang buruk yang sudah payah untuk di perbaiki lagi”.¹⁶

¹⁴ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 247

¹⁵ Abu Zahrah, *Al- Ahwalu Al- Syakhshiyah*, (Kairo: Darul Fikr Al- Araby, 1958), h. 326

¹⁶ Al- Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amami, 1985), h. 176

Apabila terjadi seperti itu, maka suami dibenarkan menjatuhkan talak kepada isterinya sehingga jatuhlah talak satu (thalak raj'i).

Islam memberikan hak talak kepada laki-laki saja karena laki-laki yang berupaya untuk mengekalkan ikatan perkawinan dengan memberikan nafkah yang begitu besar.¹⁷ Talak yang diucapkan suami tersebut baru di pandang sah apabila telah memenuhi rukunnya, yaitu suami, isteri, dan lafaz talak. Suami yang dapat menjatuhkan talak apabila ia sudah baligh sebagaimana hadits Nabi SAW:

عن علي رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال:

(تى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل)

Artinya: “*Dari Ali r.a dari Nabi SAW beliau bersabda: di angkat dosa seseorang dari tiga macam, yaitu orang yang tidur hingga bangun, anak-anak sampai ia dewasa, dan orang gila sampai ia sembuh*”. (HR. Bukhari dan Abu Daud).¹⁸

Selain itu, suami yang menjatuhkan talak tersebut harus berakal sehat dan atas kemauannya sendiri dan bukan karena ada unsur paksaan. Demikianlah pendapat Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Daud dan Umar bin Khatab.¹⁹ Akan tetapi Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat bahwa talak orang yang di paksa tetap sah. Pendapat yang dikemukakan Abu Hanifah ini tidak memiliki dasar yang

¹⁷ Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 17

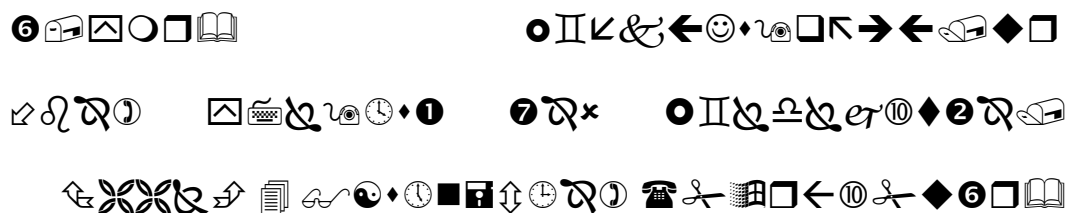
¹⁸ Muhammad Muhyi Addin 'Abdu Al-Hamid, *Sunan Abi Daud*, (tt: Darul Fikr, th), 4398, jilid II, h. 544, Ibnu Hajar al- Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Moh Mahfuddin Aladip, (Bandung: Al- Ma'arif, th). H. 399

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), Jilid 4, h. 11

jelas, apalagi pendapat ini bertentangan dengan pendapat sebagian besar para sahabat.²⁰

Lafaz sebagai rukun talak adalah semua lafaz yang artinya memutuskan ikatan perkawinan dan di pergunakan untuk menjatuhkan talak. Lafaz talak tersebut ada dua macam yaitu lafaz sharih dan lafaz kinayah. Lafaz talak yang sharih adalah kata thalak itu sendiri (lafaz yang jelas). Yaitu kata yang bisa di pahami ketika di ucapkan bermakna talak dan tidak mengandung makna lainnya, karena biasanya tidak di gunakan kecuali dalam talak, baik secara bahasa maupun tradisi.²¹ Sedangkan lafaz kinayah (kiasan) ialah kata yang tidak di gunakan untuk talak secara khusus, tapi mengandung makna talak dan makna lainnya.²²

Talak dapat di bagi kepada beberapa macam sesuai dengan sudut pandangnya. Apabila di pandang dari segi jumlah bilangannya, maka talak dapat di bagi kepada dua yaitu thalak raj'i dan thalak ba'in. Yang di maksud dengan talak raj'i adalah suatu talak di mana suami memiliki hak untuk merujuki isterinya. Dasarnya Firman Allah SWT. Surat Al-Baqarah ayat 228:



²⁰ *Ibid*, h. 12

²¹ Abu Malik Kamal bin as- Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2006) Jilid 4, h. 340

²² *Ibid*, h. 343

Artinya: “Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah”.²³

Bilangan dalam talak raj’i adalah talak satu dan dua. Bila dalam masa menanti dalam talak raj’i tersebut suami tidak ruju’ maka status talak raj’i tersebut bergeser menjadi talak ba’in. Dan suami tidak berhak merujuk isterinya yang telah di thalaknya kecuali dengan akad baru.²⁴ Talak ba’in dibagi kepada dua yaitu talak ba’in sughra dan talak ba’in kubra. Talak ba’in sughra adalah talak raj’i yang sudah habis masa iddah, sedangkan talak ba’in kubra adalah talak tiga.

Talak bila di tinjau dari segi boleh atau tidaknya di jatuhkan maka dapat pula di bagi kepada dua, yaitu talak sunny dan talak bid’iy. Talak sunny yaitu suatu talak yang di lakukan sesuai dengan garis-garis dan petunjuk yang telah di tetapkan Allah dan Rasul.²⁵ Sedangkan thalak bid’iy adalah talak yang di lakukan bukan menurut petunjuk syari’at Islam, baik mengenai waktunya maupun cara menjatuhkannya.²⁶

2. Khulu’

Khulu’ ialah perceraian antara suami isteri yang mana suami menerima tebusan dari isterinya.²⁷ Menurut ulama Hanafiyah, khulu’ berarti menghilangkan milik nikah yang di setuju atas kehendak isteri dengan lafaz khulu’ dan

²³ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 36

²⁴ Abu Malik Kamal bin as- Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, *op.cit*, h. 356

²⁵ Moh. Rifa’i, *Kifayatul Akhyar, Terjemahan Khulashah*, (Semarang: PT. Toha Putra, 1978), h. 313

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*, h. 305

seumpamanya.²⁸ Menurut ulama Syafi'iyah pengertian khulu' adalah suatu lafaz yang menunjukkan talak antara suami dan isteri dengan membayar ganti rugi (tebusan).²⁹ Khulu' dapat juga di sebut sebagai talak tebusan, karena isteri yang mengajukan khulu' menebus dirinya dengan sesuatu yang di serahkan kepada suaminya itu agar suaminya itu bersedia menceraikannya.³⁰ Hal tersebut di dasarkan atas hadis Nabi SAW:

عن ابن عباس رضي الله عنه ان امرأة ثابت بن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا

رسول الله ثابت بن قيس يب عليه في خلق ولا دين ولكن

. . اتردين عليه جديقه ؟ قالت :

عليه و سد : اقبل الحديقة و طلقها طلقه واحدة ()

Artinya: "Dari Ibnu Abbas r.a bahwasanya isteri Tsabit bin Qais pernah datang kepada Rasulullah SAW, kemudian ia berkata: Wahai Rasulullah! Aku tidak benci kepadanya, karena akhlaknya dan tidak pula benci karena keteladanannya, ketaatan beragamanya tetapi aku benci kepada nikmat dalam Islam. Rasulullah bertanya: maukah kamu mengambil taman bungannya (maskawinnya)?, ia menjawab: mau, Rasulullah bersabda, terimalah kebun itu (wahai Tsabit) dan talaklah satu kali". (HR. Bukhari dan An- Nasa'i).³¹

Mengenai kadar harta yang digunakan untuk khulu' menurut Malik dan Syafi'i hendaklah lebih banyak dari mahar yang diterimanya.³² Harta yang di

²⁸ Abdu al- Rahman al- Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahibi al- Arba'ah*, (Libanon: Maktabah Tijariyah, 1986), h. 387

²⁹ *Ibid*, h. 329

³⁰ Al-Hamdani, *op.cit*, h. 227

³¹ Muhammad Zuhri, *Hadits Shahih Bukhari*, terjemahan, (Semarang: Toha Putra, 1982), h. 592

³² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Kairo: Mustafa Al-Babil, 1345), jilid II, h. 491

berikan untuk khulu' tersebut harus di ketahui sifat dan wujudnya. Jumlah dan jenis barang yang di jadikan khulu' tersebut menurut jumhur boleh di adakan perdamaian tersebut tidak menimbulkan kerugian pada pihak isteri.³³

3. Ila'

Ila' adalah sumpah suami untuk tidak mencampuri isterinya. Seluruh mazhab sepakat bahwa, ila' dipandang jatuh manakala suami bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya seumur hidup, atau untuk masa lebih dari empat bulan.³⁴ menurut Ibnu Rusyd, ila' adalah bila seorang laki-laki bersumpah untuk tidak menggauli isterinya, apakah dalam waktu lebih dari empat bulan atau empat bulan maupun tidak di tentukan masanya.³⁵ Adanya ila' di dasarkan atas firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 226:



Artinya: “Kepada orang-orang yang mengila’ isterinya di beri tunggu empat bulan (lamanya), kemudian jika mereka kembali kepada isterinya, maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.³⁶

³³ Ibid, h. 492

³⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), h. 498

³⁵ Ibnu Rusyd, *op.cit*, h. 557

³⁶ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 36

Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa isteri yang sudah di ila' oleh suaminya, keadaanya menjadi terhenti sementara (tawaqquf) sampai habis masa empat bulan, sesudah itu suami dapat kembali kepada isterinya atau di ikrarkannya talak. Ini adalah pendapat yang terkuat dari Ali bin Abi Thalib dan Abdullah Ibn Umar.³⁷ Adapun Abu Hanifah, Ats-Tsauri, sejumlah ulama kufah dan para murid Abu Hanifah berpendapat bahwa thalak dengan sendirinya jatuh setelah berlalunya masa empat bulan, kecuali bila suami kembali kepada isterinya sebelum lewat masa empat bulan tersebut.

4. Zihar

Zihar ialah, apabila ada seorang laki-laki berkata kepada istrinya, "Bagiku, engkau seperti punggung ibuku."³⁸ atau "Engkau (isteri) atasku adalah seperti punggung ibuku".³⁹ Di sebut kata zihar (belakang) dalam contoh di atas karena tempat itulah sebagai tempat pegangan untuk memacu. Menurut pikiran orang Arab bahwa isteri adalah pacuan suami.⁴⁰ Isteri halal di gauli (dipacu) suaminya, sedangkan ibu tidak halal. Keharaman isteri dengan cara zihar itu tidak terbatas pada menyerupakannya dengan menyerupai ibu saja, tetapi dengan mahram lainnya yang haram di nikahi untuk selama-lamanya (muhrim muabbad), seperti anak sendiri, anak saudara dan sebagainya.⁴¹

³⁷ Ibnu Rusyd, *op.cit*, h. 558

³⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit*, h. 494

³⁹ Al- Imam As- Syafi'i, *Al-Umm (Kitab Induk)*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1989), h. 47

⁴⁰ Peunoh Dalih, *op.cit*, h. 345

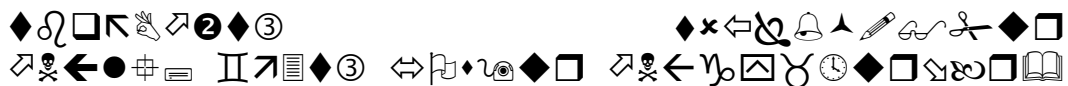
⁴¹ *Ibid*

Rukun zihar itu ada tiga yaitu suami, isteri, dan sighthat zihar itu sendiri. Suami haruslah di syaratkan orang yang sudah baligh, sehat akal nya, dan bertindak atas kesadaran atau kemauannya sendiri. Sedangkan isteri harus di dasarkan kepada perkawinan yang sah menurut ajaran Agama Islam. Adapun sighthat zihar harus di ucapkan secara jelas (sharih) dan bisa juga secara sindiran (kinayah).⁴² Akibat zihar adalah bahwa suami haram mencampuri isterinya sampai ia membayar kafarat zihar tersebut. Dan kafarat zihar itu adalah dengan memerdekakan seorang budak, atau ia berpuasa selama dua bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu dapat juga dengan memberi makan 60 orang fakir miskin.

5. Li'an

Li'an berasal dari bahasa arab, yaitu dari la'ana yang berarti mengutuk.⁴³ Menurut istilah Syara' li'an adalah suami menuduh isteri berzina sedangkan isterinya tidak mengakuinya atau suami tidak mengakui kandungan isterinya.⁴⁴

Putusnya perkawinan dalam bentuk li'an menurut Abu Hanifah di anggap sebagai thalak ba'in, sedangkan menurut jumhur ulama di anggap sebagai fasakh, karena keduanya tidak dapat lagi untuk menikah buat selama-lamnaya.⁴⁵ Dasar hukum li'an ini terdapat di dalam Al- Qur'an Surat An-Nur ayat 6 – 9, yang berbunyi:

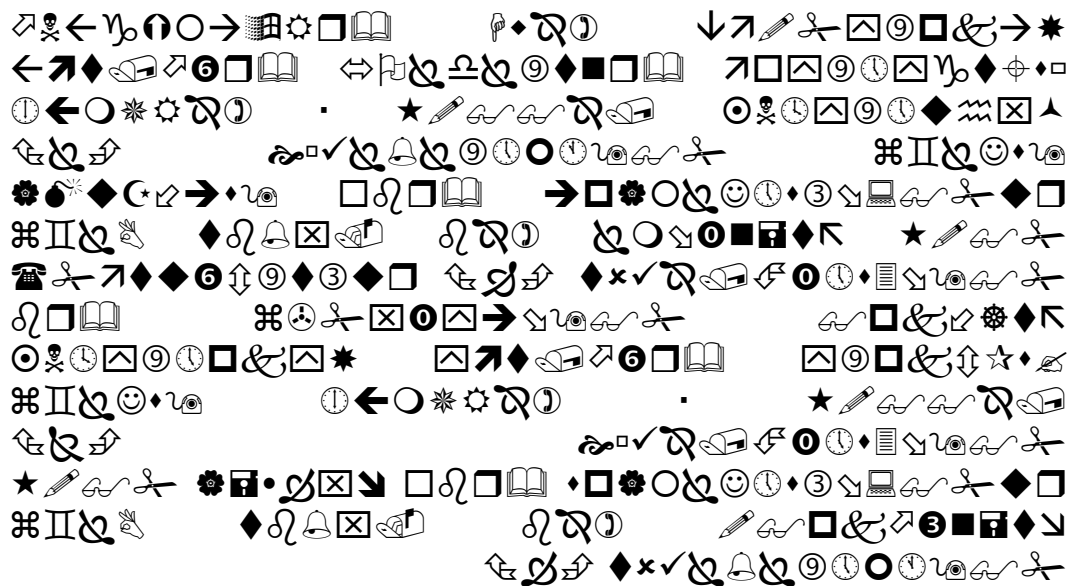


⁴² *Ibid*, h. 347

⁴³ Idris Marbawi, *op.cit*, h. 220

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 241

⁴⁵ *Ibid*, h. 138



Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar (6). Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta (7). Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta (8). dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar (9)”.⁴⁶

Perceraian juga dapat terjadi karena di sebabkan suami melanggar ta'lik talak, yaitu putusnya suatu perkawinan yang disebabkan karena sudah terpenuhi syarat-syaratnya.⁴⁷ Misalnya, apabila suami tidak memberi nafkah wajib. Menurut lughat, nusyuz berarti durhaka, sedangkan menurut istilah syara', nusyuz adalah suatu tindakan dari pihak suami atau dari pihak isteri yang mengabaikan tugas tiga bulan berturut-turut maka jatuhlah talak satu kali. Ta'lik talak adalah semacam

⁴⁶ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 350

⁴⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1982), h. 129

ikrar atau janji suami untuk menggantungkan terjadinya perceraian bila ikrar yang di maksud tersebut sudah terlanggar.

Adapun maksud di adakannya ta'lik talak itu adalah sebagai upaya untuk melindungi isteri dari tindakan sewenang-wenang suaminya. Bila suami menyia-nyiakan isterinya maka isteri dapat mengadu kepada hakim akan mengabulkannya bila telah terbukti kebenaran pengaduan isteri yang bersangkutan.⁴⁸

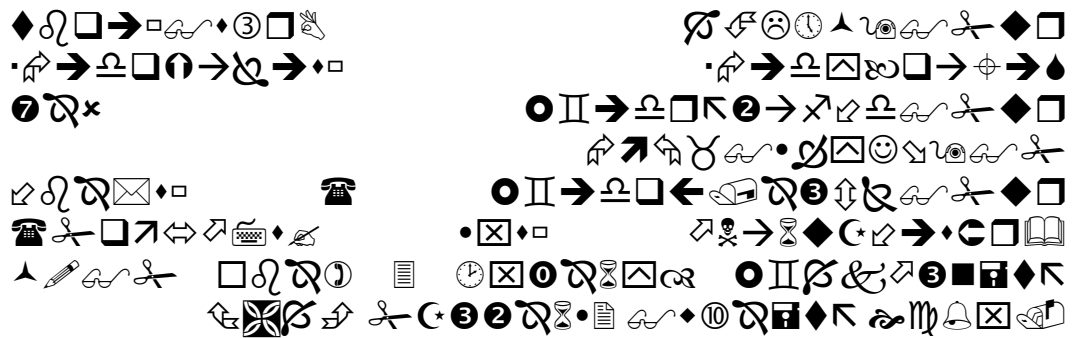
Bila terjadi perceraian dengan melanggar ta'lik talak maka suami di benarkan ruju' kepada isterinya selama masih dalam masa iddah. Hal ini dimungkinkan bila ta'lik talak yang di langgar tersebut hanya satu kali talak dan tanpa uang iwadh. Akan tetapi apabila isteri akan mengadu kepada hakim pengadilan, dan dengan membayar uang iwadh maka suami tidak boleh lagi ruju' kepada bekas isterinya. Bila bekas suaminya atau keduanya ingin bergaul maka harus dengan pernikahan yang baru.

6. Nusyuz

Menurut lughat, nusyuz berarti durhaka, sedangkan menurut istilah syara' nusyuz adalah suatu tindakan dari pihak suami atau pihak isteri yang mengabaikan tugas mereka dalam kehidupan berumah tangga.

Apabila seseorang isteri nusyuz (durhaka) kepada suaminya, maka hendaklah di beri nasehat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 34, yang berbunyi:

⁴⁸ Peunoh Daly, *op.cit*, h. 287



Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasehatilah

*mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya’ sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.*⁴⁹

Sesuai dengan bunyi ayat diatas maka tata cara menghadapi isteri nusyuz adalah dengan memberikan nasehat, bila dengan cara nasehat tidak berhasil, maka suami hendaklah berpisah tempat tidur dengannya. Bila kedua cara tersebut tidak juga berhasil, maka suami boleh memukulnya selama pukulan tersebut akan mendatangkan manfaat bagi kelangsungan hidup keluarga namun pukulan tersebut tidak boleh membahayakan diri isteri sendiri. Meskipun sudah berpisah tempat tidur atau memukulnya, namun suami tetap dianjurkan bertegur sapa dengan isterinya itu.

7. Fasakh

Fasakh adalah membinasakan atau merusak ikatan perkawinan kedua suami isteri.⁵⁰

Putusnya perkawinan dalam bentuk fasakh disebabkan karena:

⁴⁹ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 84

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 314

- a. Setelah akad nikah terlaksana, ternyata antara suami dan isteri adalah muhrim
- b. Suami dan isteri di aqadkan ketika masih kecil (khiyar baligh) dan setelah dewasa ia berhak menentukan (menetapkan) perkawinan atau mengakhirinya dengan fasakh akad
- c. Cacat, misalnya kemaluan suami terpotong, impoten dan lain sebagainya. Fasakh juga dapat terjadi menurut imam Malik bila suami gila, terkena penyakit sopak/belang/kusta, kulit terputus, berlobang, putusnya zakar maupun lemah syahwat. Sebaliknya suami juga berhak minta fasakh bila isterinya gila, sopak/kusta, kulit terputus/berlobang, tumbuh daging maupun tulang pada kemaluan isteri.
- d. Suami tidak memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun bathin. Menurut Malik, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa bila suami tidak memberi nafkah, maka hakim boleh memfasakhnya.⁵¹
- e. Suami mafqud, yaitu tidak di ketahui dan sudah terputus komunikasi antara keduanya, dan juga tidak diketahui apakah suami masih hidup atau sudah meninggal dunia. Menurut imam Malik, apabila suami mafqud selama empat tahun tanpa izin isteri atau tanpa sebab-sebab lainnya, maka perkawinannya sudah dapat di fasakh, dan isteri sudah halal di nikahi oleh laki-laki lain sesudah masa iddahnya yaitu empat bulan 10 hari.⁵² Sedangkan menurut Abu Yusuf Muhammad serta salah satu qaul dari mazhab Syafi'i mengatakan,

⁵¹ *Ibid*, h. 288

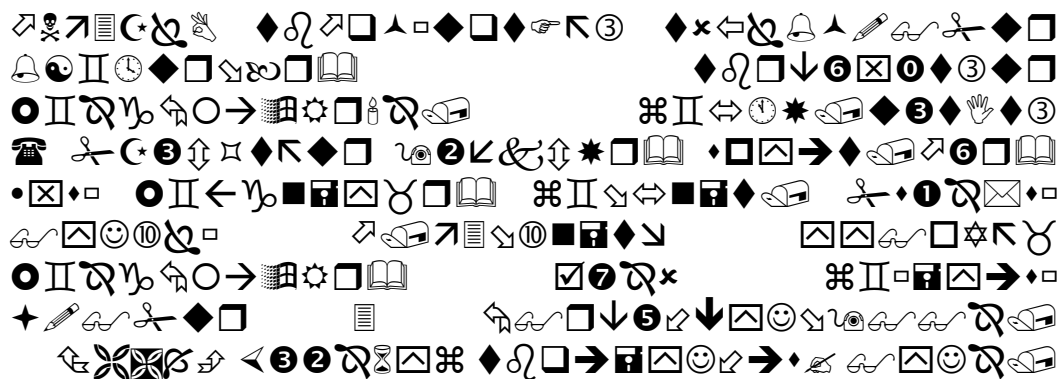
⁵² Maliki, *Al-Muwattha'*, (Kairo: Mustafa Al-Babi Al- Halabi, 1951), Jilid II, h. 28

bahwa wanita yang suaminya mafqud harus menunggu sehingga ada berita tentang kematiannya atau hidupnya secara meyakinkan.⁵³

- f. Apabila suami dipenajara maka menurut Ahmad ikatan perkawinannya juga dapat di fasakh, sedangkan menurut imam Malik cukup hanya di talak saja jika suaminya di penjara selama tiga bulan, dan isteri berhak menuntut perceraian.⁵⁴ Selain itu fasakh juga dapat terjadi jika suami menganiaya isterinya , misalnya memukul, membakarnya, dan sebagainya.

8. Wafat.

Dengan meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya terjadinya perceraian. Jika isteri yang meninggal, suaminya tidak mempunyai iddah, dan jika suaminya yang meninggal dunia maka isterinya mempunyai masa iddah selama empat bulan sepuluh hari sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah ayat 234:



Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan

⁵³ Ibnu Rusyd, *op.cit*, h. 110

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 91

mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.⁵⁵

C. Hukum Menjatuhkan Talak

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum asal menjatuhkan talak. Menurut imam Syafi'i bahwa hukum asal menjatuhkan talak adalah makruh dengan alasan hadits Nabi SAW, sebagai berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال (رواه ابو داود و ابن ماجه, وصححه الد , رساله)

Artinya: “*Dari ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: perkara halal yang paling di benci Allah adalah Thalak*” (HR. Abu Daud, dan Ibnu Majah. Hadis ini dishahihkan oleh Al-Hakim, namun Abu Hatim mentarjihnya sebagai hadis mursal).⁵⁶

Selain itu, bahwa thalak itu berarti mengingkari nikmat Allah karena perkawinan adalah termasuk nikmatnya, dan manusia haram mengingkari nikmat Allah, dan bentuk kejahatan terhadap isteri.⁵⁷ karena itu tidak boleh di kerjakan kecuali dalam keadaan darurat. Menurut mazhab Malik, bahwa hukum talak bukan makruh, hanya saja mendekati kepada makruh, yang dikatakan oleh sebagian mereka bahwa hal itu tergantung pada kuat atau tidaknya penyebab terjadinya talak. Hukumnya berubah menjadi haram bila berat dugaan akan terjadi

⁵⁵ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 38

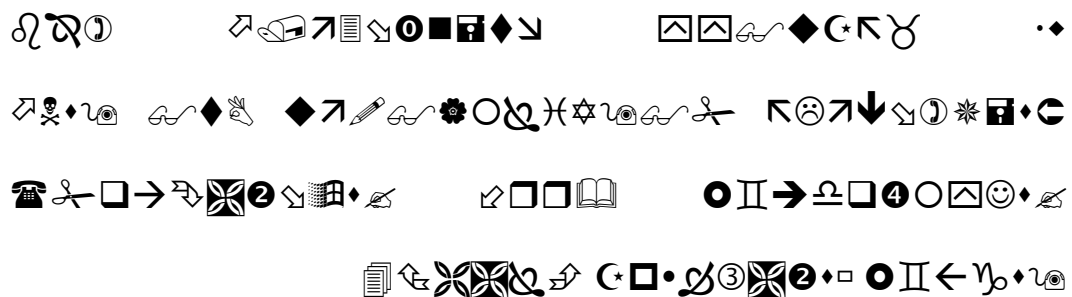
⁵⁶ Muhammad Muhyiy Addin ‘Abdu Al-Hamid, *Sunan Abi Daud*, 2178, jilid I, *op.cit*, h. 661, Mahmud Khalil, *Sunan Ibnu Majah*, (tt: Maktabah Abi Al-Ma’athy, th), 2018, Jilid 3, h. 180

⁵⁷ Sayyid Sabiq, Jilid 4, *op.cit*, h. 4

perzinahan dengan perempuan lain sesudah di thalaknya atau dengan wanita yang lain.⁵⁸

Dalam mazhab Hanafi ada dua pendapat, yaitu Ja'iz (boleh) dan Hadhar (terlarang) atau haram. Yang benar dalam mazhab Hanafi antara kedua hukum itu adalah terlarang.⁵⁹

Menurut mereka menjatuhkan talak tanpa sebab di pandang sebagai melampaui batas atau suatu penganiayaan kepada wanita karena itu tidak boleh menjatuhkan thalak tanpa sebab, dengan demikian perceraian seperti ini merupakan perbuatan yang dibenci Allah.⁶⁰ Sebahagian ulama berpendapat bahwa hukum asal menjatuhkan talak itu adalah mubah dengan alasan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah ayat 236:



Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya”.⁶¹

⁵⁸ Abdurrahman Al- Jaziri, *op.cit*, h. 296

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Sayyid Sabiq, Jilid 4, *op.cit*, h. 4

⁶¹ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 38

Dalam lembaran sejarah telah terjadi bahwa Rasulullah SAW mentalak isterinya Hafsa, meskipun turun wahyu yang menyuruh Nabi untuk merujukinya. Beberapa sahabat juga pernah mentalak isterinya. Hasan seringkali kawin dan menjatuhkan talak di kufah sehingga orang tuanya Ali bin Abi Thalib terpaksa memperingatkan masyarakat bahwa putranya itu mentalak isterinya, maka janganlah dia (hasan) tersebut di jadikan menantu.⁶²

Wewenang menjatuhkan talak berada di tangan suami, dan penggunaan wewenang menjatuhkan talak itu tergantung pada keadaan dan masalah yang terdapat dalam suatu rumah tangga yang bermacam-macam, maka hukum talakpun bermacam-macam, yaitu sebagai berikut:

1. Wajib, yaitu talak yang di lakukan oleh kedua orang hakim atau hakim sebagai akibat kasus syiqaq suami isteri yang tidak dapat di damaikan, dan kedua hakim berpendapat bahwa hanya talaklah satu-satunya jalan penyelesaian mereka yang terakhir. Demikian pula bila terjadi peristiwa ila' akan di jatuhkan talak setelah empat bulan menunggu diucapkan talak. (sumpah tidak akan menggauli isterinya). Dari kedua contoh di atas maka hukumnya adalah wajib di laksanakan talak.
2. Haram, yaitu talak yang di jatuhkan tanpa sebab. Pekerjaan yang demikian akan merugikan kedua belah pihak dan menghilangkan kemashlahatan mereka yang dapat di capai oleh perkawinan itu, padahal di halalnya perkawinan merupakan suatu nikmat, maka memutuskan ikatan perkawinan tanpa sebab adalah dilarang. Talak yang demikian menurut sebagian penganut mazhab Hanafi

⁶² Peunoh Daly, *op.cit*, h. 252

hukumnya adalah haram. Akan tetapi menurut Syafi'i, Hambali hukumnya adalah makruh. Sedangkan Mahmud Yunus menyebutkan hukum talak seperti itu adalah makruh/mubah.⁶³

3. Mubah, yaitu menjatuhkan talak karena ada sesuatu sebab, seperti isteri tidak dapat menjaga diri dikala suaminya tidak ada dirumah, isteri yang berbahaya terhadap suami atau yang tidak baik akhlaknya.
4. Sunat, yaitu menjatuhkan talak terhadap isteri yang menyia-nyiakan kewajibannya terhadap Allah SWT. Seperti tidak mengerjakan ibadat, meskipun sudah berulang kali di peringatkan.
5. Makruh, yaitu talak yang dijatuhkan kepada isteri yang saleh dan berbudi mulia. Ketika tidak ada keperluan untuk melakukan perceraian, padahal suami isteri itu kehidupan rumah tangganya masih normal.⁶⁴

D. Rukun Talak dan Syarat-syarat Talak

1. Rukun-rukun Talak

Para ulama fiqih berbeda pandangan dalam menentukan rukun-rukun talak. Sebagaimana ulama fiqih menyatakan rukun talak itu ada tiga, yakni:

1. Suami
2. Isteri
3. Sighat Talak

⁶³ *Ibid*, h. 253

⁶⁴ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *op.cit*, h. 316

D.1.a. Syarat-syarat suami yang sah menjatuhkan talak

a. baligh

tidak sah talak yang di jatuhkan oleh seorang suami yang masih anak-anak. Sebagaimana sabda Rasulullah berbunyi:

(: عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصغير

حتى يكبر, و عن المجنون حتى يعقل, او يفيق) رواه احمد والاربعة الا الترميذي وصححه

, واخرجه ابن حبان

Artinya: “dari ‘Aisyah, dari Nabi SAW bersabda: di angkat qalam dari tiga (orang) : dari orang yang tidur hingga ia sadar, dan dari anak kecil hingga besar, dan dari orang gila hingga ia sembuh”. Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan empat kecuali tarmidzi, dan dishahkan dia oleh hakim, dan di keluarkan dia oleh Ibnu Hibban”.⁶⁵

Hadis ini menjelaskan bahwa, talak anak-anak, orang tidur serta orang gila adalah tidak sah, karena mereka tidak cukup dalam bertindak hukum.

b. Berakal sehat

Berdasarkan hadis diatas, orang gila itu tidak sah menjatuhkan talak, karena orang gila akalnya sudah lemah, dengan mudah akalnya dapat dikalahkan oleh emosinya atau pengaruh-pengaruhnya yang datang dari luar. Akalnya sudah tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya, akalnya tidak mampu lagi membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

c. Kemauan sendiri

Suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya tidak boleh atas paksaan orang lain. Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

⁶⁵ Muhammad Muhyi Addin ‘Abdu Al-Hamid, *Sunan Abi Daud*, 4398, Jilid II, *op.cit*, h. 544, Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006), h. 485

وعن ابن عباس رضي الله عنهما, : ن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ,
والنسيان, وما التكرهوا عليه. رواه ابن ماجه والحاكم

Artinya: “Dan dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi SAW bersabda, “sesungguhnya Allah Ta’ala telah memaafkan kesalahan dan kealpaan dari umatku, serta apa-apa yang mereka dipaksa untuk melakukannya.” HR. Ibnu Majah dan Al-Hakim”.⁶⁶

Menurut hadis diatas, suami yang dipaksa untuk mentalak isterinya tidak sah talaknya karena perbuatan tersebut bukan atas kehendak dan kemauannya sendiri melainkan paksaan. Itulah pendapat Imam Malik, Syafi’i dan Daud.

Sedangkan menurut Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat, bahwa talak orang yang di paksa tetap jatuh (sah) dengan syarat yang dipaksa itu mengucapkan “lafaz talak”, sekalipun ia tidak rela. Menurutny menjatuhkan talak karena terpaksa sama dengan menjatuhkan talak dengan cara berolok-olok sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد, وهزلهن جد: , , . (, وصحه ا)

Artinya: ”Dan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata,” Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal, kesungguhannya di hukumi serius dan main-mainnya juga dihukumi serius: Nikah, talak dan rujuk”. (HR. Al-Arba’ah selain Nasa’i dan telah dishahihkan Al-Hakim).⁶⁷

⁶⁶ Mahmud Khalil, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid I, *op.cit*, h. 659

⁶⁷ Muhammad Muhyi Addin ‘Abdu Al-Hamid, *Sunan Abi Daud*, 2194, Jilid I, *op.cit*, h. 666, Mahmud Khalil, *Sunan Ibnu Majah*, 2039, jilid 3, *op.cit*, h. 197

Kemudian bagi suami yang tidak sempurna akal sehatnya dan tidak atas kemauannya sendiri dalam menjatuhkan talak, para ulama berbeda pendapat tentang sah atau tidaknya talak yang di jatuhkan oleh suami tersebut. Diantara tanda suami yang tidak sehat akalnya seperti:

1. Suami dalam keadaan sangat marah

Para Fuqaha, menyatakan bahwa talak tersebut tidak sah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Hakim yang disahkannya dari ‘Aisyah binti Abu Bakar, sebagai berikut:

روى احمد وابو داود وابن ماجه والحاكم وصححه عن عائشة رضي الله عنه:

: . .

Artinya: “*Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Hakim yang dishahkannya dari ‘Aisyah, berkata: bahwa Nabi SAW bersabda: tidak ada talak dan tidak ada pemerdekaan budak bila tertutup akalnya*”.⁶⁸

Dalam hal ini seandainya seorang suami itu marahnya masih mengetahui dan menyadari apa yang di ucapkannya, maka talaknya sah, karena di anggap sebagai orang sadar.

2. Talak dalam keadaan mabuk

Para fuqaha berbeda pendapat dalam hal ini. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa talak orang yang mabuk tetap sah sekalipun ia tidak menyadari dan mengetahui apa yang di ungkapkannya, alasan mereka adalah, orang tersebut dengan sadar meminum-minuman yang diharamkan syara’.

⁶⁸ Muhammad Muhyi Addin ‘Abdu Al-Hamid, *Sunan Abi Daud*, 2193, Jilid I, *op.cit*, h. 666, Mahmud Khalil, *Sunan Ibnu Majah*, 2046, jilid 3, *op.cit*, h. 201

Sedangkan sebagian ulama lain berpendapat bahwa talak orang yang sedang mabuk tidak sah meskipun mabuknya itu perbuatan maksiat dengan sengaja meminum yang memabukkan itu.

3. Talak dalam keadaan main-main

Seorang suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya dalam keadaan main-main, seperti ketika suami bersenda gurau, lalu isteri berkata kepada suaminya “Jatuhlah talak kepada saya, maka suami menjawab dengan bersenda gurau pula saya jatuhkan talak saya kepada kamu”, maka menurut jumhur fuqaha talak suami dalam keadaan main-main adalah jatuh.

D.1.b. Syarat isteri yang ditalak

- a. Ada ikatan pernikahan antara dirinya dengan suaminya, baik secara hakikat maupun hukum.
- b. Suami menentukan isteri yang ditalaknya.⁶⁹

D.1.c. Sighat Talak

Sighat talak artinya suatu kata yang mempunyai arti memutuskan ikatan perkawinan, atau pelepasan hubungan antara suami isteri, serta sighat itu harus dipahami oleh masyarakat juga dikenal dalam syari'at, dengan lafaz langsung, tulisan atau dengan isyarat (bagi yang bisu). Lafaz talak yang menunjukkan putusannya ikatan perkawinan, baik lafaz sharih maupun kinayah.⁷⁰

⁶⁹ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, jilid 4, *op.cit*, h. 339

⁷⁰ Djamaan Nur, *op.cit*, h. 142

Menurut para fuqaha, syarat-syarat lafaz talak itu adalah:

- a. Lafaz yang dipergunakan mengandung makna talak, baik secara bahasa maupun menurut adat kebiasaan, yang disampaikan melalui tulisan maupun isyarat yang bisa dipahami.
- b. Orang yang ditalak (isteri) memahami secara jelas maknanya, sekalipun dengan menggunakan bahasa masing-masing.
- c. Lafaz itu dijatuhkan kepada isteri
- d. Lafaz talak itu menunjukkan dengan jelas bilangan yang dijatuhkan.

Adapun lafaz-lafaz yang menunjukkan makna talak ada dua, yakni:

- a. Lafaz sarih

Lafaz sarih yaitu kata-kata yang menunjukkan secara jelas dan tegas misalnya, artinya engkau saya talak, atau lafaz yang menurut adat kebiasaan setempat digunakan sebagai lafaz talak seperti: artinya engkau haram bagiku.

Apabila syarat-syarat lafaz sarih sudah lengkap, maka talak suami yang dijatuhkan kepada isteri jatuh, sekalipun tidak disertai niat, begitu juga dengan lafaz kinayah yang sudah dipahami disuatu daerah disamakan hukumnya dengan lafaz sarih.

- b. Lafaz kinayah

Adapun lafaz kinayah ialah suatu kata yang bisa diartikan talak dan bisa diartikan yang lain (mempunyai arti lengkap). Seperti kata suami kepada isteri “kembalilah engkau kepada orang tuamu”.

BAB IV

PROSES PENYELESAIAN TALAK YANG SUDAH TERJADI DI LUAR SIDANG PENGADILAN AGAMA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pelaksanaan Talak di Pengadilan Agama Bangkinang

Di Indonesia, Dalam menyelesaikan sebuah kasus keperdataan bagi umat Islam, sejak di undangkannya Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diamandemen menjadi UU No. 3 tahun 2006¹ tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Peradilan merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Adapun mengenai Kompetensi absolut dari Peradilan Agama dapat kita baca dalam ketentuan pasal 49 ayat (1):

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama dan antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan shadaqah.²

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia, Pasca UU No. 3 Tahun 2006*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 5

² *Ibid*, h. 48

Disamping itu masalah perkawinan di atur juga oleh Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974. Dalam pasal 39 ayat 1 UU perkawinan, pasal 115 KHI dan pasal 65 UU No. 3 tahun 2006/ No. 7/1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa; *“perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”*.³

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 pasal 18 menyatakan *“perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan”*.⁴

Dalam proses pelaksanaan talak di Pengadilan Agama Bangkinang ada beberapa tahap yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bangkinang sebagai berikut:

1. Tahap Pengajuan Permohonan

Dalam perkara pengucapan lafaz talak di luar sidang Pengadilan Agama Bangkinang penulis membahas 3 kasus yaitu perkara yang terdaftar No. 52/Pdt.G/2009/PA.Bkn yaitu HM selaku Pemohon (yang mengajukan permohonan perceraian) antara isteri selaku termohon dengan Nama SF dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

³ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 530, UURI. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h. 93, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: FokusMedia, 2005), h. 38., Undang- undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (Medan: Duta Karya, 1995), h. 21

⁴ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, *op.cit* , h. 551

- a. Bahwa Termohon adalah isteri sah dari HM yang menikah pada tanggal 17 November 2008 dan tercatat pada PPN KUA Kec. Kampar.
- b. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon belum pernah bergaul (qobla dukhul), serta antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai sampai sekarang,
- c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Limau Manis selama lebih kurang satu bulan setengah, dan sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, yang mana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Naumbai sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Limau Manis sampai sekarang,
- d. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama dua minggu, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon serba kekurangan, dimana pekerjaan Pemohon sebagai penyadap karet tidak tetap, Pemohon juga melakukan pekerjaan sampingan seperti kernet colt diesel, dan pernah pada bulan Januari 2009 jam 21.00 WIB malam, ketika itu Pemohon pulang kerja dari memuat barang dagangan dari Air Tiris, setibanya di rumah Termohon tidak mau membuka pintu, padahal waktu itu Pemohon sangat lelah karena pulang dari kerja, akhirnya Pemohon pergi ke rumah teman untuk menumpang tidur,
- e. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak pada hari jum'at tanggal 23 Januari 2009, dimana ketika itu Pemohon baru pulang kerja dari

Lipat Kain untuk memasang tenda, kemudian Pemohon pulang kerumah kediaman bersama mengganti pakaian untuk shalat jum'at, akan tetapi Termohon enggan membuka pintu kamar, akhirnya Pemohon menjatuhkan talak secara liar kepada Termohon,

- f. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

Perkara No. 235/Pdt-G/2010/PA-Bkn, yaitu BS yang mengajukan permohonan perceraian selaku Pemohon, dan NS selaku Termohon (Isteri Pemohon), dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon adalah isteri sah dari BS yang menikah pada tanggal 28 Pebruari 2002 dan tercatat pada PPN KUA Kec. Tapung.
- b. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai layaknya suami isteri dan telah dikurniai 2 orang anak bernama:
 - b.a. Dava Budi Alchori, laki-laki umur 6 tahun,
 - b.b. Dithia Budi Syauvira, perempuan umur 2 tahun, dan sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon, serta antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai sampai sekarang,
- c. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Kasikan selama 8 tahun, dan sejak bulan Pebruari 2010 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang mana Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon sampai sekarang,

- d. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis selama lebih kurang 5 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak bersyukur atas apa yang diberikan oleh Pemohon, Termohon juga tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai isteri, disamping itu Termohon jarang memasak untuk pemohon dan sering menolak untuk melayani kebutuhan bathin Pemohon,
- e. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak pada bulan Pebruari 2010, yang dimulai pada bulan Januari 2010 yang mana pada waktu itu Pemohon dikeroyok oleh Termohon dan saudara Termohon yang bernama Randi dan Pemohon tidak mengetahui alasan pengeroyokan tersebut, dua minggu setelah itu didamaikan kembali oleh keluarga dan pada bulan Pebruari 2010 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal,
- f. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

Register Perkara No. 10/Pdt.G/2011/PA.Bkn adalah SY selaku Pemohon, yang mengajukan permohonan perceraian kepada Isteri Pemohon FD (selaku Termohon), dengan duduk perkara sebagai berikut;

- a. Bahwa Termohon adalah isteri yang sah dari SY yang menikah pada tanggal 30 September 2001 dan tercatat pada PPN KUA Kec. Kampar.
- b. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Koto Perambahan selama 2 tahun, setelah itu Pemohon dengan Termohon pindah ke warung milik pemohon di koto perambahan selama 5 tahun, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di

rumah Pemohon di Koto Perambahan, dan setelah menikah Pemohon dengan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan di karuniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama:

b.a. Muhammad Rehan, umur 8 tahun,

b.b. Azka Alfi Ibnu Hiban Baihaki, umur 5 tahun dan sekarang anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon, serta antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai sampai sekarang,

- c. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 6 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon suka main-main sehingga tidak memperdulikan keluarga, dan juga Termohon suka berbohong terhadap Pemohon, kalau Pemohon nasehati Termohon tidak mau mendengarkan Pemohon bahkan Termohon membangkang, disamping itu Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, hal ini Pemohon ketahui dari anak kandung Termohon sendiri dan juga dari tetangga Pemohon dengan Termohon,
- d. Bahkan semenjak kejadian tersebut diatas Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang mana Pemohon tinggal warung milik Pemohon di Koto Perambahan sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Koto Perambahan sampai sekarang.

2. Tahap Penunjukan Majelis Hakim

Setelah perkara terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama, maka panitera menyampaikan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Agama, setelah

itu baru kemudian ketua Pengadilan Agama dapat menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan mengeluarkan surat penetapan penunjukan majelis hakim.

Dalam pemeriksaan perkara ini Ketua Pengadilan Agama Bangkinang menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Dra. Hasnidar, MH sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH dan H. M. Arief, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam perkara HM (selaku Pemohon) dan SF (selaku Termohon), penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Bangkinang pada tanggal 04 Pebruari 2009.

Drs. H. Sudirman. MH, sebagai Hakim Ketua dan Dra. Nurzauti, SH, MH, dan Drs. M. Zen, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam perkara BS (selaku Pemohon) dan NS (selaku Termohon), penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Bangkinang pada tanggal 07 Mei 2010.

Dan perkara SY (selaku Pemohon) dengan FD (selaku Termohon), dengan Dra. M. Taufik, MH sebagai Hakim Ketua, Drs. Mohd. Yusuf dan Dra. Siti Khadijah sebagai Hakim Anggota, penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Bangkinang pada tanggal 04 Januari 2011.

3. Penetapan Hari Sidang

Dalam penetapan hari sidang, Ketua Majelis Hakim mengeluarkan surat Penetapan Hari Sidang (PHS) untuk menentukan hari sidang pertama akan dimulai.

Berdasarkan penetapan hari sidang, pemanggilan akan dilakukan kepada Pemohon untuk menghadiri sidang sesuai dengan hari, tanggal, jam, dan tempat yang ditunjuk dalam penetapan hari sidang.⁵

Penetapan hari sidang ini antara lain berisikan surat panggilan kepada pihak yang berperkara (pemohon) supaya dapat menghadiri sidang pada hari, tanggal, jam dan tempat yang sudah ditentukan.

Dalam perkara HM (selaku Pemohon) dan SF (selaku termohon), majelis hakim Pengadilan Agama Bangkinang telah menentukan penetapan hari sidang. Dan pada hari rabu tanggal 11 Pebruari 2009 bertempat di Pengadilan Agama Bangkinang, maka sidang pertama digelar.

- a. Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon datang sendiri-sendiri kepersidangan
- b. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati para pihak dalam rangka perdamaian, bahkan usaha perdamaian tersebut telah dilaksanakan melalui mediasi dengan mediator Drs. M. Zen, SH, MH Hakim Pengadilan Agama Bangkinang, akan tetapi tidak berhasil;
- c. Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan Pemohon;
- d. Bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang dibacakan di persidangan dilanjutkan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 83

- a) Bahwa benar Termohon telah menikah dengan Pemohon, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 November 2008 yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Kampar, namun sebelum proses nikah terjadi ada silang sengketa antara Pemohon dan Termohon, dimana selama bertunangan selama 8 bulan setelah waktu yang ditentukan tersebut sampai Pemohon lari dari tanggung jawab dan tidak bersedia menikah dengan Termohon, sehingga kasusnya sampai kepihak kepolisian (Polsek Kampar) yang akhirnya diadakan perdamaian dan Pemohon menikah dengan Termohon,
- b) Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tidak pernah bergaul layaknya, karena Pemohon tidak mau menggauli Termohon, namun selama Pemohon dan Termohon bertunangan telah melakukan zina sebanyak lebih kurang 6 kali, hal tersebut Pemohon dan Termohon lakukan dengan sadar dan suka sama suka, dan sekarang Termohon sudah tidak perawan lagi, Termohon heran kenapa Pemohon tidak mau menggauli termohon padahal sudah halal karena sudah suami/isteri sah Termohon sudah siap untuk melayani Pemohon,
- c) Bahwa Pemohon tidak menghargai Termohon sebagai isteri sah, Pemohon pergi sesuka hatinya tanpa memberi tahu kepad Termohon, sedangkan kerjanya pergi pagi pulang jam 12.00 malam, Termohon tidak pernah menuntut belanja lebih kepada Pemohon, berapa yang diberikan Pemohon Termohon terima, ada yang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ada pula Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap minggunya,

- d) Bahwa benar Pemohon telah menjatuhkan talak liar kepada Termohon pada tanggal 23 Januari 2009, Pemohon datang mendobrak pintu lalu menjatuhkan talak setelah itu langsung pergi sampai sekarang tanpa mengirimkan nafkah untuk Termohon,
- e) Bahwa benar pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
- e. Bahwa Termohon setuju diceraikan Pemohon dan Termohon menuntut berupa;
 - a) Kekurangan nafkah yang lalu selama 3 minggu sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - b) Nafkah iddah sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - c) Mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- f. Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - a) Bahwa apa yang disampaikan Termohon dalam jawabannya semua benar;
 - b) Bahwa terhadap tuntutan Termohon, Pemohon bersedia membayar;
 - (a) Kekurangan nafkah yang lalu Pemohon bersedia membayar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - (b) Nafkah iddah sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - (c) Mut'ah sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- g. Bahwa atas replik pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan di persidangan sebagai berikut;

- a) Bahwa Termohon tidak akan memberikan tanggapan lagi tentang replik pemohon tersebut, dan tetap pada jawaban semula;
- b) Bahwa terhadap tuntutan Termohon tentang kekurangan nafkah yang lalu, nafkah iddah dan mut'ah, Termohon tetap pada tuntutan Termohon semula.

Saya menceraikan isteri saya pertama kalinya dirumah mertua saya pada pertengahan Januari 2009 karena kami memang tinggal bersama mertua, dengan kata “saya ceraikan kamu”, saya sudah tidak tahan lagi, saya menceraikannya karena dia sudah sering tidak mau membuka pintu rumah ketika saya pulang dan saya pribadi juga merasa tidak dianggap sebagai suaminya. Saat sidang dipengadilan hakim menanyakan tentang lafaz talak kami dirumah, tetapi hakim menjelaskan, bahwa talak yang diakui hanya melalui sidang Pengadilan Agama.⁶

Selama kami menikah, suami saya tidak pernah memberi tahu dia pergi kemana, dia pergi seenaknya, pergi begitu saja dan pulang larut malam bahkan suami saya tidak mau menggauli saya. Saya merasa tidak berumah tangga.⁷

Perkara BS (selaku pemohon) dan NS (selaku termohon), penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Bangkinang pada hari senin tanggal 07 Mei 2010 bertempat di Pengadilan Agama Bangkinang, maka sidang pertama digelar.

- a. Bahwa dihari persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri-sendiri, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal

⁶ HM (Salah Seorang yang menceraikan isterinya diluar sidang PA), *Wawancara*, Naumbai, 4 desember 2011

⁷ SF (Isteri Pemohon yang diceraikan di luar Sidang PA), *Wawancara*, Desa Limau Manis, 7 Desember 2011

mungkin bahkan melalui hakim mediator yaitu Drs. Nursolihin, MH. Pada tanggal 24 Mei 2010, sesia dengan PERMA Nomor; 01 tahun 2008, untuk nasehati dan mendamaikan para pihak namun upaya tersebut tidak berhasil;

- b. Bahwa sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 07 Mei 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang pada tanggal 07 Mei 2010 dengan register perkara Nomor 235/Pdt.G/2010/PA.Bkn, yang isi pokoknya tetap di pertahankan oleh Pemohon, namun sebelum Termohon memberikan jawaban, Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah, dan nafkah dua orang anak untuk masa yang akan datang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;
- c. Berikut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan didepan Sidang sebagai berikut;
- d. Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan Pemohon;
 - a) Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri sah, menikah suka sama suka dan telah mempunyai dua orang anak yang sekarang berada dalam pemeliharaan Pemohon,
 - b) Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun selama lebih kurang 5 tahun, setelah itu mulai tidak rukun yang penyebab bukan karena Termohon tidak pandai bersyukur, akan tetapi disebabkan karena ekonomi yang tidak mencukupi;

- c) Bahwa sekarang ini termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan bersedia menerima akibat perceraian sesuai dengan yang disanggupi oleh Pemohon, baik nafkah iddah, maupun nafkah dua orang anak yang akan datang sedangkan muth'ah termohon tidak menuntut, termohon relakan saja;
- e. Bahwa dalam tahap replik Pemohon tidak membantah jawaban Termohon dan menyatakan tetap pada permohonanannya untuk bercerai dengan Termohon dan bersedia membayar nafkah iddah, dan nafkah dua orang anak untuk masa yang akan datang;
- f. Bahwa dalam tahap duplik Termohon tidak mengajukan tanggapan apapun dan menyatakan tetap pada jawaban semula, baik tentang perceraian maupun tentang akibat perceraian yang disanggupi oleh Pemohon.

Kami bercerai karena isteri saya yang dulu itu tidak memperdulikan rumah tangga, dia jarang masak, sepulang saya kerja terkadang saya tidak menjumpai masakan, kami juga selalu cekcok, selalu bertengkar bahkan isteri saya tidak mau saya gauli. Dia bilang kalau badan saya bau lah. Saya menalaknya dengan kata “saya talak kamu”.⁸

Kami cerai dirumah karena kami sering berantem, kami sering cekcok, saya dituduh tidak memperdulikan keluarga, saya dituduh tidak mau masaklah, bukan saya tidak mau masak tapi masalah ekonomi, kadang uang belanja tidak dikasih terpaksa saya kadang minjam uang kepada tetangga dan juga kepada

⁸ BS (Pemohon yang menceraikan isterinya di luar sidang Pengadilan Agama), *Wawancara*, Kasikan, 3 Januari 2012

orang tua saya, bahkan saya merasa segan kepada orang tua saya karena selalu minjam uang.⁹

Penetapan hari sidang perkara SY (selaku pemohon) dengan FD (selaku termohon), penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Bangkinang pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2011 di Pengadilan Agama Bangkinang, maka sidang pertama digelar;

Bahwa pemohon dan Termohon masing-masing hadir dan menghadap kepersidangan yang ditetapkan dan diadakan, dan atas kehadiran Pemohon dan Termohon di persidangan Ketua Majelis menjelaskan bahwa setiap perkara yang dihadiri oleh kedua belah pihak di persidangan harus melalui mediasi;

Bahwa atas penjelasan ketua majelis tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat menunjuk Drs. M. Zen, SH, MH., sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi sudah dilakukan, ternyata mediasi gagal atau tidak berhasil;

Bahwa walaupun mediasi gagal, namun majelis hakim tetap berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun dan kumpul baik dalam rangka membina rumah tangga bahagia dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa usaha damai dari majelis hakim juga tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan dengan penambahan bahwa anak Pemohon dan termohon 3 orang yang ketiga bernama

⁹ NS (Isteri Pemohon yang diceraikan di luar sidang Pengadilan Agama), *Wawancara*, Kasikan 3 Januari 2012

Ibnu Hiban Baihaki, hal mana isi permohonan Pemohon tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawabannya secara lisan dipersidangan yang mana pokoknya sebagai berikut;

- a. Bahwa benar Termohon dengan Pemohon sebagai suami isteri menikah pada tanggal 30 September 2001 di Desa Koto Prambahan dan telah dikaruniai tiga orang anak, yang paling kecil tinggal bersama Termohon dan dua orang lagi tinggal bersama Termohon;
- b. Bahwa nama-nama ketiga anak tersebut adalah:
 1. Muhammad Rehan, laki-laki berumur 8 tahun;
 2. Azka AlFitri, laki-laki berumur 5 tahun;
 3. Ibnu Hiban, laki-laki berumur 10 bulan;
- c. Bahwa setelah menikah benar kami tinggal berpindah-pindah dan terakhir kembali ke Koto Perambahan;
- d. Bahwa tidak benar rumah tangga kami yang harmonis hanya 6 tahun, tapi rumah tangga kami yang harmonis adalah selama 8 tahun, setelah itu benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- e. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon adalah ikut campur pihak ketiga yaitu orang tua Pemohon pernah mengusir Termohon dari tempat kediaman bersama pemohon dan Termohon, orang tua Pemohon menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon;

- f. Bahwa tidak benar Termohon berselingkuh dan suka main-main dan tidak memperdulikan rumah tangga sendiri, tapi yang benar Pemohon telah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin Termohon;
- g. Bahwa Pemohon bersedia bercerai dengan baik di Pengadilan Agama ini dan kalau Pemohon menceraikan, kewajibannya akan Termohon terima;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pokoknya tetap pada permohonannya tetap pada cerai semula dan terhadap kewajiban Pemohon, Pemohon bersedia membayar berupa:

- 1. Nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 2. Muth'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 3. Nafkah untuk 3 orang anak yang akan datang masing-masing 1. Muhammad Rehan, 2. Azka Alfitri dan, 3. Ibnu Hiban Baihaki sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik secara lisan dipersidangan yang ada pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan mengenai kewajiban yang disanggupi Pemohon, Termohon dapat menerimanya;

Saya cerai dengan isteri karena saya memang sudah terlalu emosi karena masalah kami itu terus, dinasehati dia melawan, isteri saya juga selingkuh,

pertama kali saya menceraikannya ketika saya menasehatinya sepulang main voli karena saya tidak menjumpainya dirumah, dia selalu keluar rumah tiap sore.¹⁰

Memang kami sering cekcok, tapi ketika saya keluar rumah, pergi kemana saja saya minta izin sama dia, tapi mantan suami saya itu yang ternyata diam-diam menikah dengan wanita lain. Sebenarnya orang tuanya yang selalu menghasut suami saya untuk bercerai dengan saya.¹¹

4. Tahap Pembuktian (Bukti-bukti)

Diantara tindakan hakim dalam pemeriksaan perkara perdata yang amat penting dan yang harus pertama-tama diperiksa ialah pendengaran terhadap saksi-saksi. Ini termasuk tindakan hakim mengenai pembuktian dari barang atau sesuatu yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Pendengaran saksi adalah salah satu cara untuk membuktikan kebenaran dari keterangan suatu pihak yang oleh pihak lain bisa jadi dimungkiri keberadaannya.¹²

Adapun pembuktian dimuka pengadilan merupakan hal yang terpenting dalam menyelesaikan perkara sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Yang dimaksud dengan pembuktian dilihat dari pihak yang berperkara (pencari keadilan) adalah upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim dimuka

¹⁰ SY (salah seorang pemohon yang menceraikan isterinya di luar sidang pengadilan Agama), *Wawancara*, Koto Perambahan, 14 Januari 2012

¹¹ FD (Isteri pemohon yang dicerai diluar Sidang Pengadilan Agama), *Wawancara*, Koto Perambahan, 14 Januari 2012

¹² Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1992), Cet I, h. 82

sidang. Sedangkan dipandang dari segi pengadilan yang memeriksa perkara adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh hakim untuk memutuskan perkara. Jadi pembuktian itu merupakan hal yang sangat penting yang diperlukan oleh pencari keadilan maupun Pengadilan.¹³

Dalam hal pembuktian terhadap Perkara No. 52/Pdt.G/2009/PA.Bkn, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- a. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 505/41/XI/2008 tanggal 17 November 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, disebut P.1;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan keluarga masing-masing untuk didengar keterangannya oleh majelis hakim sebagai berikut:

1. Keluarga Pemohon:

SAKSI I

- a) Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri sah mereka menikah atas dasar suka sama suka dan direstui oleh pihak keluarga kedua belah pihak;
- b) Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon hanya lebih kurang 1 bulan, setelah itu mereka berpisah tempat tinggal, karena sering cekcok;
- c) Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

¹³ Roihan A. Rasyid, *op.cit.*, h. 148-149

- d) Bahwa untuk selanjutnya pihak keluarga menyerahkan keputusan kepada Pemohon dan Termohon;

2. Keluarga Termohon:

SAKSI II

- a) Bahwa benar Pemohon suami sah Termohon, mereka menikah atas dasar suka sama suka;
 - b) Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon lebih kurang 1 bulan, setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang;
 - c) Bahwa setelah menikah Pemohon adan memberikan nafkah untuk Termohon antara Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perminggu;
 - d) Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan untuk selanjutnya keputusan diserahkan kepada mereka;
- c. Bahwa atas keterangan pihak keluarga tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya, dan selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan cerainya begitu juga dengan Termohon menyatakan tetap pada jawabannya.

Pembuktian terhadap Perkara No. 235/Pdt-G/2010/PA-Bkn, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa;

- a. Potocopi Kutipan Akta Nikah yang dilegalisir No. 310/62/V/2002 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung tanggal 22 Mei 2002 setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai yang cukup, bukti P. 1;
- b. Bahwa selain bukti surat Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi keluarga kedua belah pihak yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. SAKSI I

- a) Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri sah, saksi hadir waktu mereka menikah;
- b) Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini mereka ini mereka tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal;
- c) Bahwa penyebab rumah tangga mereka tidak rukun saksi tidak mengetahui secara pasti dan saksi pernah memperbaiki mereka akan tetapi tidak berhasil;
- d) Bahwa melihat situasi sekarang ini nampaknya sudah sulit untuk memperbaiki mereka;

2. SAKSI II

- a) Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri sah, mereka menikah suka sama suka dan telah dikaruniai dua orang anak;

- b) Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang ini mereka tidak rukun lagi yang ditandai dengan pisah tempat tinggal;
- c) Bahwa penyebab mereka tidak rukun saksi tidak mengetahui secara pasti hanya saja menurut Termohon rumah tangganya tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- d) Bahwa saksi sebagai orang dekat dengan Termohon (para pihak) pernah menasehati Termohon agar berbaik kembali dengan Pemohon, namun Termohon tidak mau berbaik lagi dengan Pemohon;
- c. Bahwa masing-masing pihak membenarkan keterangan saksi keluarga dan tidak memberikan tanggapan apapun lagi.
- d. Bahwa dalam tahap kesimpulan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan kesanggupannya untuk membayar hak Termohon sebagai akibat perceraian sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan menerima kesanggupan Pemohon untuk membayar akibat perceraian.

Adapun Pembuktian terhadap perkara No. 10/Pdt.G/2011/PA.Bkn, menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis kepersidangan berupa :

- a. Potocopi duplikat Kutipan Akta Nikah No. K.04.02/2/PW.01/662/2009, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkinang, dengan Nezeglen Pos setelah diperiksa ternyata sama dengan aslinya yang

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar, tanggal 30 Desember 2009, selanjutnya disebut bukti (P.1)

- b. Bahwa Pemohon menghadirkan satu orang saksi keluarga dipersidangan bernama:

SAKSI I

- a) Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi dan Termohon sebagai menantu saksi;
- b) Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah dengan dasar suka sama suka direstui oleh kedua belah pihak keluarga;
- c) Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah saksi dan telah dikaruniai 3 orang anak, 2 orang tinggal bersama Pemohon dan 1 orang tinggal bersama Termohon;
- d) Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 tahun disebabkan Termohon tidak memperhatikan rumah tangga, Termohon suka main volli setiap sore, dan ada informasi dari orang lain bahwa Termohon ada membawa laki-laki kerumah ketika Pemohon tidak berada dirumah;
- e) Bahwa saksi ada berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Termohon marah kepada saksi ketika dinasehati, menurut saksi mereka tidak mungkin lagi baik;

Bahwa tahap keterangan keluarga Pemohon tersebut, Termohon membantah bahwa tidak benar Termohon main volli tanpa seizin Pemohon dan

tidak benar juga Termohon membawa orang laki-laki kerumah ketika Pemohon tidak berada dirumah;

SAKSI II

Bahwa Termohon juga menghadirkan satu orang saksi keluarga kepersidangan bernama Z dibawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi adalah adik sepupu dari Termohon dan benar Pemohon dan Termohon sebagai isteri sah dan saksi hadir ketika mereka menikah;
 - b) Bahwa setahu saksi setelah menikah Termohon dan termohon tinggal dirumah orang tua termohon, kemudian pindah kekedai dan telah dikaruniai 3 orang anak, 2 orang tinggal bersama Pemohon dan 1 orang tinggal bersama Termohon;
 - c) Bahwa setahu saksi sekarang antara Termohon dengan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sebih kurang 1 tahun dan penyebab mereka berpisah saksi tidak mengetahuinya;
 - d) Bahwa saksi ada memberikan nasehat kepada Termohon dan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi mereka tidak bisa dipersatukan lagi;
- c. Bahwa terhadap keterangan saksi keluarga Termohon tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;
 - d. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan masing-masing serta telah mohon

kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang untuk menjatuhkan putusan.

5. Tahap Putusan dan Penetapan

Setelah pengadilan memeriksa perkara, maka majelis harus mengadili dan memberikan keputusan dan mengeluarkan produknya. Produk Pengadilan Agama sejak berlakunya undang-undang No. 7 tahun 1989 mencakup dua macam yaitu Putusan dan penetapan.¹⁴

Dalam perkara ini pihak majelis hakim mengeluarkan produknya berupa putusan dan bukan penetapan karena terdapat sedikit perbedaan antara putusan dan penetapan. Perbedaannya adalah kalau putusan terdapat identitas dari pihak-pihak yang berperkara yaitu penggugat dan tergugat yang mana pemisah keduanya itu ada kata-kata **“berlawanan dengan”** dengan arti kata kalau sebuah perkara diakhiri dengan putusan, maka perkara tersebut terdiri dari penggugat dan tergugat. Sedangkan bedanya dengan penetapan adalah identitas pihak-pihak pada permohonan dan hanya memuat identitas Pemohon saja disamping itu tidak ditemui kata-kata **“berlawanan dengan”** dengan arti kata perkara yang diakhiri dengan penetapan maka perkara tersebut hanya terdiri dari Pemohon sendiri saja dan tidak ada lawan.¹⁵

Didalam perkara yang terdaftar No. 52/Pdt.G/2009/PA.Bkn, pihak majelis hakim mengeluarkan produknya berupa putusan atas perkara cerai talak.

¹⁴ *Ibid*, h. 199

¹⁵ Dra. Hasnidar, MH (Hakim Pengadilan Agama Bangkinang), *Wawancara*, Pengadilan Agama Bangkinang, 19 Januari 2012

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon kompensi HM untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra kepada Termohon kompensi SF didepan sidang Pengadilan Agama Bangkinang;

Dalm Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi sebagian;
2. Menghukum penggugat rekonpensi untuk membayar kepada tergugat rekonpensi berupa;
 - 2.1. Kekurangan nafkah yang lalu selama 3 (tiga) minggu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
3. Tidak menerima selain dan selebihnya;

Dalam kompensi dan rekonpensi;

1. Membebaskan kepada Pemohon kompensi/tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan setelah musyawarah Majelis hakim pada hari kamis tanggal 12 Maret 2009 M bersamaan dengan tanggal 24 Rabiul

Awal 1430 H, oleh kami oleh Dra. Hasnidar, MH sebagai ketua majelis, Dra. Hj Sofinar Mukhtar, MH dan H. M. Arief, SH, MH, masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari ini juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis didampingi para hakim anggota dibantu oleh Siti Rusani. Y. BA sebagai panitera pengganti di hadapan Pemohon konpensi/tergugat rekonpensi dan Termohon konpensi/penggugat rekonpensi.

Talak saya dipengadilan bunyinya “ menjatuhkan talak satu kepada isteri saya dengan nama SF”.¹⁶

Putusan atas perkara cerai talak dengan register perkara No. 235/Pdt-G/2010/PA-Bkn;

Mengingat undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini,

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon BS untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon NS di depan sidang Pengadilan Agama Bangkinang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

¹⁶ HM, *op.cit*

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangkinang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung untuk pencatatan,
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikain putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis Hakim pada hari senin 07 juni 2010 M, bersamaam dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1431 H, oleh kami Drs. Sudirman, MH, sebagai Hakim Ketua dan Dra. Nurzauti, SH., MH, dan Drs. M. Zen, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu pula oleh Nasri Alamsa, SH, sebagai Panitera sidang yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Bentuk talak saya di Pengadilan Agama Bangkinang, saya kurang ingat kalau tidak salah “jatuh talak satu kepada isteri saya dengan nama NS”.¹⁷

Pengadilan Agama Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara No. 10/Pdt.G/2011/PA.Bkn,

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

¹⁷ BS, *op.cit*

2. Memberi izin kepada Pemohon (SY) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (FD) di depan Sidang Pengadilan Agama bangkinang.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah untuk 3 orang anak masing-masing bernama sebagai berikut;
 - 1) Muhammad Rehan, laki-laki berumur 8 tahun;
 - 2) Azkia Alfitri, laki-laki berumur 5 tahun;
 - 3) Ibnu Hiban Baihaki, laki-laki berumur lahir 2 Mei 2010 minimal sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang pada hari Rabu, Tanggal 16 Pebruari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1432 H, oleh kami Dra. M. Taufik, MH sebagai Hakim Ketua, Drs. Mohd. Yusuf dan Dra. Siti Khadijah sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bangkinang Register Perkara Nomor: 10/Pdt.G/2011/PA.Bkn tanggal 4 Januari 2011 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat pertama dibantu oleh Netti Adha, SH, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Saya mengucapkan talak di depan Sidang Pengadilan Agama Bangkinang dengan Lafaz “saya dengan nama Syamsiwir menjatuhkan talak kepada isteri saya nama FD”.¹⁸

Lafaz talak itu di ucapkan didepan sidang Pengadilan Agama setelah putusan itu berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).¹⁹ Adapun bunyi lafaz talak di Pengadilan Agama adalah “Bahwa pada hari ini..... tanggal..... tahun..... saya, nama..... menjatuhkan talak satu raj’i terhadap isteri saya, nama..... didepan sidang Pengadilan Agama Bangkinang”.²⁰

Talak yang di ucapkan di luar sidang Pengadilan Agama (talak liar) yang di ucapkan oleh Pemohon kepada Termohon tidak menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam putusannya.²¹ Dalam surat permohonan Pemohon terkadang di muat bahwa, pemohon telah menjatuhkan talak liar kepada termohon²² namun tidak menjadi pertimbangan pada saat sidang, terkadang hakim ada juga yang menanyakan tentang talak liar tapi hakim hanya mengatakan talak yang di perhitungkan adalah talak di depan sidang Pengadilan Agama berdasarkan pada ketentuan Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.²³

¹⁸ SY, *op.cit*

¹⁹ Nasri Alamsa, SH (Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Bangkinang), Wawancara, Bangkinang, 26 Januari 2012

²⁰ Dra. Hasnidar, *op.cit*

²¹ *Ibid*

²² Nasri Alamsa, SH, *op.cit*

²³ Dra. Hasnidar, *op.cit*

Menurut hemat penulis bahwa, dalam proses pelaksanaan cerai talak di Pengadilan Agama Bangkinang dilakukan melalui proses yang panjang yaitu, mulai dari mediasi atau mendamaikan para pihak untuk berdamai, pemeriksaan saksi-saksi sampai pada putusan perkara cerai talak. Dalam putusannya, hakim memberi Izin kepada Pemohon (suami) untuk mengucapkan lafaz talak kepada termohon (isteri) di depan sidang Pengadilan Agama.

Jika dilihat dari putusan majelis hakim dalam perkara cerai talak, majelis hakim Pengadilan Agama Bangkinang telah mengabulkan permohonan Pemohon yaitu untuk menceraikan isterinya dan mengucapkan lafaz talak di depan sidang Pengadilan Agama Bangkinang yang mana sebelumnya pemohon telah mengucapkan lafaz talak diluar sidang Pengadilan Agama.

B. Proses Penyelesaian Talak di Pengadilan Agama Bangkinang Terhadap Talak yang Terjadi di Luar Sidang Pengadilan Agama

Dalam penyelesaian perkara cerai talak di Indonesia, dalam hal ini adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Agama terkhusus di Pengadilan Agama Bangkinang. Dalam pasal 35 UU perkawinan menyatakan *“perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”*.

Sebelum hakim melakukan pemeriksaan mendalam tentang permohonan Pemohon untuk bercerai, maka hakim Pengadilan Agama berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator yang telah ditunjuk oleh hakim

Pengadilan Agama.²⁴ Jika mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka pada saat sidang hakim juga tetap berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.²⁵ Tujuan adanya mediasi adalah bukan memerintahkan untuk rujuk terhadap talak yang pernah diucapkan di luar sidang Pengadilan Agama akan tetapi untuk memberikan pandangan kepada Pemohon dan Termohon supaya membatalkan niatnya untuk bercerai dan melakukan perdamaian (untuk membina rumah tangga). Setelah Pengadilan berkesimpulan, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, maka dengan cukup bukti Pengadilan menetapkan bahwa permohonan cerai talak Pemohon tersebut dikabulkan.²⁶ Penyelesaian kasus talak akan di periksa melalui sidang di Pengadilan mulai dari pemeriksaan dalil-dalil talak Pemohon, pemeriksaan alat bukti, termasuk juga pemanggilan terhadap saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon.²⁷ Yang terakhir adalah pengambilan dan pembacaan putusan Pengadilan.

Dalam pasal 39 ayat 1 UU perkawinan dan pasal 115 KHI dinyatakan bahwa; *“perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama....”*.²⁸

²⁴ Dra. Hasnidar, MH (Hakim Pengadilan Agama Bangkinang), *op.cit*

²⁵ *Ibid*

²⁶ Amir Syarifuddin dan Harun Al Rashid, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah tentang Badan-badan Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, th), h. 743

²⁷ Dra. Hasnidar, MH (Hakim Pengadilan Agama Bangkinang), *op.cit*

²⁸ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, *op.cit*, h. 530, UURI. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *op.cit*, h. 38

Berpedoman pada Pasal diatas, hakim Pengadilan Agama tidak memandang adanya talak yang di ucapkan diluar sidang Pengadilan Agama atau disebut talak liar.²⁹ Talak liar dianggap tidak ada. Dalam menyelesaikan kasus talak diluar sidang tetap diproses sama seperti kasus perceraian talak/permohonan talak pada umumnya.³⁰ Hakim tidak membedakan penyelesaian kasus antara talak yang pernah diucapkan diluar Sidang Pengadilan Agama dengan talak yang diperiksa di Pengadilan Agama.³¹

Terkadang dalam surat permohonan yang diajukan pemohon ada juga yang di cantumkan telah terjadinya talak liar³² namun hal itu tidak menjadi pertimbangan Hakim dalam pengambilan keputusan kasus cerai talak di Pengadilan Agama.³³

Dapat dipahami bahwa, dalam proses pelaksanaan cerai talak terhadap talak di luar Sidang Pengadilan Agama adalah sama seperti pengajuan surat permohonan cerai talak karena talak diluar Sidang Pengadilan Agama tidak diperhitungkan oleh hakim, hal ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam artian talak yang terjadi diluar sidang Pengadilan Agama dianggap tidak jatuh (tidak ada).

²⁹ Nasri Alamsa, SH, *op.cit*

³⁰ Dra. Hasnidar, MH (Hakim Pengadilan Agama Bangkinang), *op.cit*

³¹ *Ibid*

³² Nasri Alamsa, SH (Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Bangkinang), *op.cit*

³³ Dra. Hasnidar, MH (Hakim Pengadilan Agama Bangkinang), *op.cit*

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Penyelesaian Talak yang Sudah Terjadi di Luar Sidang Pengadilan Agama

Penulis akan memulai peninjauan hukum Islam terhadap proses-proses yang di lalui dalam pelaksanaan talak di Pengadilan Agama Bangkinang.

Proses pelaksanaan talak di Pengadilan Agama Bangkinang berdasarkan pada penjelasan sebelumnya yaitu tahap pengajuan permohonan. Permohonan cerai talak adalah termasuk bidang hukum keperdataan sekaligus merupakan wewenang Pengadilan Agama. Untuk melakukan tuntutan tersebut (cerai talak) harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah suami. Sedangkan pengadilan atau hakim bersifat pasif artinya hanya menunggu tuntutan yang di ajukan kepadanya.³⁴

Dengan demikian hakim tidak mencari perkara untuk diselesaikan didalam masyarakat, melainkan masyarakatlah yang mengajukan persoalannya ke pengadilan. Dan pada masa-masa permulaan Islam, belum dikenal adanya pencatatan kasus-kasus dan putusan-putusan hukum, dan caranya yaitu pihak-pihak yang berperkara datang menghadap qadli dan langsung menyampaikan pengaduan masing-masing, dan setelah qadli mengetahui mana pihak yang benar dan mana pihak yang bersalah, maka langsung pada saat itu dijatuhkan putusan hukum, dan pemilik hak mengetahui haknya.³⁵ Pengajuan permohonan tidaklah

³⁴ Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), h. 10

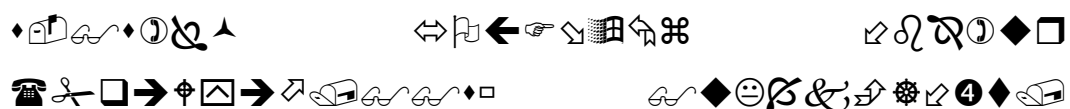
³⁵ Muhammmad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), h. 66

menyalahi hukum Islam tujuannya adalah minta kepada hakim untuk menyelesaikan perkaranya.

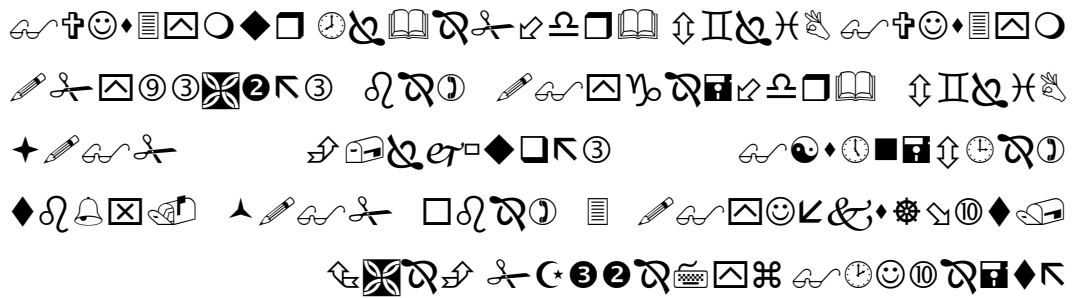
Untuk memeriksa dan mengadili sebuah perkara maka perlu ditunjuknya majelis hakim untuk itu, dalam Islam disebut dengan Qadhi (hakim) yaitu orang yang menyelesaikan suatu perkara dengan hukum.³⁶ Pada masa Rasulullah, beliau yang langsung bertindak sebagai hakim. Untuk didaerah-daerah, Rasulullah mengutus para sahabatnya (untuk menjadi hakim) menyelesaikan perkara seperti diutusny Mu'az bin jabal ke Yaman. Di Indonesia, penetapan majelis hakim dilaksanakan oleh Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Setelah penunjukan majelis hakim, maka perlu adanya penetapan hari sidang. Tujuannya adalah supaya para pihak dapat menghadiri persidangan sesuai dengan hari, tanggal, jam dan tempat yang telah ditunjuk dalam penetapan hari sidang.

Pada saat sidang pertama dimulai, hakim Pengadilan Agama membacakan surat dakwaan/permohonan, setelah itu hakim menyuruh kepada para pihak untuk berdamai, arti kata menghilangkan niat untuk bercerai dalam hal ini akan di tunjuk mediator. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 35.



³⁶ Moh. Rifa'i, *Kifayatul Akhyar, Terjemahan Khulashah*, (Semarang: PT. Toha Putra, 1978), h. 443



Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam (Juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.³⁷

Proses pelaksanaan talak selanjutnya adalah tahap pembuktian (pemeriksaan bukti-bukti). Tujuan dari pembuktian adalah untuk mengetahui dan memperkuat dalil-dalil pemohon untuk bercerai.

Dalam pasal 164 HIR/284 R.bg alat-alat bukti itu terdiri atas³⁸:

1. Alat bukti surat

- a. Akta autentik, yaitu surat yang dibuat menurut keterangan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hal tersebut didalam surat itu, dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 84

³⁸ M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 35

diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut.³⁹

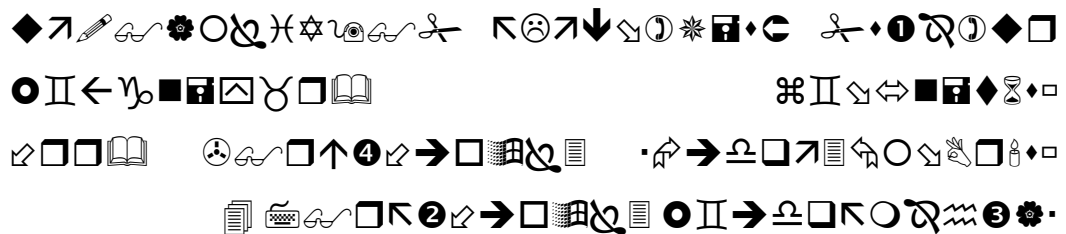
- b. Akta di bawah tangan. Dipandang sebagai akta dibawah tangan yaitu surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan surat yang ditandatangani dan dibuat dengan tidak memakai bantuan seorang pejabat umum.⁴⁰

2. Saksi

Persaksian dalam Talak

Para ahli fiqh berpendapat bahwa talak dapat terjadi tanpa persaksian. Menurut hukum Islam talak tanpa persaksian adalah sah, sebab talak itu adalah hak suami dan untuk menggunakan hak tersebut dia tidak perlu menghadirkan saksi.⁴¹

Firman Allah surat Al-Baqarah; 231



Artinya: “*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula)*”.

³⁹ *Ibid*, h. 36

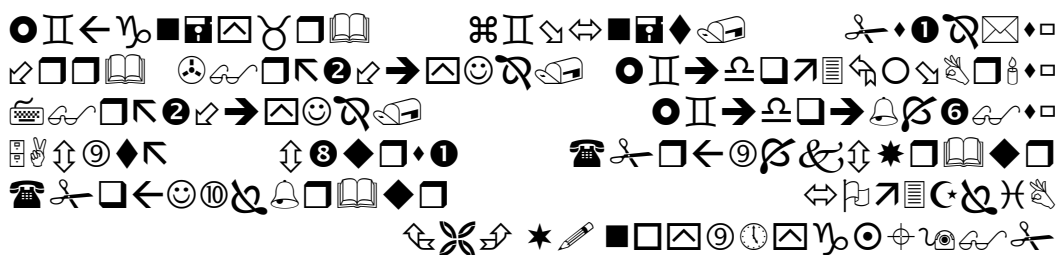
⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), h. 145

Ibnu Qoyyim mengatakan bahwa talak itu hak suami, suami tidak memerlukan persaksian untuk mempergunakan haknya tersebut.⁴²

Berbeda dengan pendapat sebagian besar fuqoha golongan Syi'ah Imamiyah mengatakan bahwa adanya persaksian dalam talak adalah perlu dan merupakan syarat bagi sah tidaknya talak tersebut.⁴³

Alasan mereka adalah firman Allah SWT Surat Ath-thalaq: 2



Artinya: “Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah”.

Diantara para sahabat yang berketetapan mempersaksikan talak itu hukumnya wajib dan merupakan syarat sah talak adalah Ali bin Abi Thalib dan Imran bin Khusen. Dari kalangan tabi'in adalah Muhammad Al-Baqir dan Ja'far Ash-Shiddiq. Dari tokoh anak-anak keluarga Rasulullah adalah Atha' Ibn Juraid dan Ibnu Sirin.⁴⁴ Menurut ulama dari kalangan salaf dan khalaf, diantaranya imam

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), Jilid 4, h. 26

yang empat dan lainnya, kesaksian dalam ayat ini adalah sebagai perintah anjuran, bukan kewajiban.⁴⁵

Dinegara kita Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 yunto, PP No. 9 tahun 1975 pasal 14, 16 dan 19 lebih cendrong terhadap keharusan adanya persaksian dalam pelaksanaan talak ini. Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 menyatakan:

- (1) Bercerai hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁴⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 14, 16:

- (14) Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
- (16) Pengadilan hanya memutuskan untuk memutuskan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa suami isteri yang

⁴⁵ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *op.cit*, h. 352

⁴⁶ Moh. Asnawi, *Himpunan Peraturan dan Undang-undang RI Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*, (Menara: Kudus, 1975), h. 16

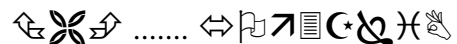
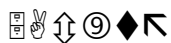
bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴⁷

Dari pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah ini tampak jelas bahwa talak menjadi sah apabila dilakukan didepan sidang Pengadilan, hal ini berarti adanya persaksian talak.

Dalam perkara talak dipengadilan Agama Bangkinang saksi yang dipergunakan adalah menghadirkan pihak-pihak yang mengetahui tentang keadaan rumah tangga yang berperkaranya. Dalam hal ini lebih diutamakan adalah keterangan dari pihak keluarga kedua belah pihak yang mungkin lebih mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Saksi-saksi yang adil, meskipun masih dimungkinkan dustanya pihak yang memberikan pengakuan dan saksi-saksi tersebut, tetapi yang lazim, bahwa manusia tidak berbuat dusta terhadap diri sendiri, demikian juga yang lazim, bahwa saksi-saksi yang adil tidak akan berdusta⁴⁸ dan saksi yang tidak memberi keterangan yang sebenarnya harus ditolak.⁴⁹

Sebagaimana firman Allah SWT:



⁴⁷ *Ibid*, h. 45

⁴⁸ Muhammad Salam Madkur, *op.cit.*, h. 93

⁴⁹ Moh. Rifa'i, dkk, *op.cit*, h. 454

Artinya: “*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari padamu*”.

(Ath-Thalaq: 2)

3. Persangkaan

Supaya hakim dapat menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dan penyelesaian itu memenuhi tuntutan keadilan maka wajib bagi hakim itu untuk mengetahui hakekat dakwaan. Adapun pengetahuan hakim tentang hakekat dakwaan itu adakalanya ia menyaksikan sendiri peristiwanya, atau menerima keterangan dari pihak lain yang bersifat mutawatir, dan jika tidak demikian, maka tidak dapat disebut sebagai pengetahuan hakim tapi hanya dapat disebut sebagai persangkaan (dhan)⁵⁰ yaitu persangkaan yang tidak beralasan. Pembawa syari’at menerima dasar dhanniyah (persangkaan) sesudah mengambil langkah-langkah yang cernat, dan pengetahuan hakim itu dipandang cukup dengan cara menampilkan bukti-bukti.

4. Pengakuan

Yang disebut dengan pengakuan adalah “ *Pengakuan pihak lawan (tergugat/tertuduh), dimuka sidang, tentang suatu peristiwa hukum yang dituduhkan /digugatkan kepadanya*”.⁵¹

Dan terjadinya pengakuan itu adalah ditengah-tengah proses pemeriksaan gugatan/tuduhan yang berkenaan dengan peristiwanya.

⁵⁰ Muhammad Salam Madkur, *op.cit.*, h. 92

⁵¹ *Ibid*, h. 101

5. Sumpah

Diantara hak penggugat, apabila tergugat tidak dapat membuktikan gugatannya, tergugat menolak isi gugatan tersebut, penggugat boleh mengajukan tuntutan kepada hakim agar menyumpah tergugat.⁵²

Sumpah bukanlah merupakan alat bukti untuk menetapkan hak, tapi ditempuh karena penggugat menemukan kebohongan dari pihak tergugat dan menolak surat gugatan atau karena mengharapkan menolaknya pihak yang diminta melakukannya didepan sidang pengadilan.⁵³

Dalam kasus cerai talak di Pengadilan Agama Bangkinang, alat bukti yang dipergunakan adalah alat bukti tertulis seperti potokopi kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama yang bersangkutan. Selanjutnya pemeriksaan alat bukti saksi. Alat bukti saksi yang dipergunakan adalah orang yang mengetahui keadaan rumah tangga yang berperkara terutama dari pihak keluarga kedua belah pihak.⁵⁴

Setelah pembuktian selesai, tahap terakhir adalah tahap pengambilan dan pembacaan putusan. Apabila perkara cerai talak Pemohon dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan Agama berisi tentang pemberian izin kepada Pemohon Untuk mengucapkan lafaz talak terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama. Apabila perkara cerai talak ini pertama kali diajukan didepan sidang

⁵² *Ibid*, h. 111-112

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Nasri Alamsa, SH, *op.cit*

Pengadilan Agama maka dalam putusan disebutkan “menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon”.

Jika suami tidak mengucapkan lafaz talaknya pada saat sidang Pengadilan Agama (tidak datang pada saat pengucapan lafaz talak pada saat sidang Pengadilan Agama), maka suami dianggap sudah berdamai dengan isterinya (tidak jadi bercerai).⁵⁵

Dalam proses penyelesaian talak di Pengadilan Agama Bangkinang terhadap lafaz talak yang terjadi di Luar Sidang Pengadilan Agama Bangkinang, pengadilan memprosesnya sama dengan permohonan talak yang baru, mulai dari pembacaan surat permohonan cerai talak sampai pada pembuktian dan putusan. Pengadilan tidak mengesahkan dan memandang lafaz talak yang diucapkan di luar sidang Pengadilan Agama atau disebut talak liar,⁵⁶ karena talak yang sah adalah talak yang di ucapkan di depan sidang Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974. Pasal 39 ayat 1 UU perkawinan dan pasal 115 KHI dinyatakan bahwa; “*perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*”.⁵⁷

Setiap perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bangkinang, Pemohon (suami) harus mengucapkan lafaz talak di depan sidang Pengadilan Agama

⁵⁵ Dra. Hasnidar, MH (Hakim Pengadilan Agama Bangkinang), *op.cit*

⁵⁶ Nasri Alamsa, SH (Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Bangkinang), *op.cit*

⁵⁷ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, *op.cit*, h. 530, UURI. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *op.cit*, h. 93, Kompilasi Hukum Islam, *op.cit*, h. 38

Bangkinang, ini berarti seorang suami yang telah mengucapkan lafaz talak di luar sidang Pengadilan Agama Bangkinang harus mengulangi kembali lafaz talak di depan Sidang Pengadilan Agama karena lafaz talak diluar sidang Pengadilan Agama dianggap tidak ada (tidak jatuh). Apakah pengulangan lafaz talak seperti ini terhitung talak satu atau talak dua?

Para ulama sepakat bahwa, talak yang diucapkan setelah habis masa iddah talaknya tidak jatuh, karena isteri bukan lagi menjadi miliknya (tidak lagi berstatus sebagai suami isteri) sebab tidak ada talak kecuali setelah akad nikah. Bila iddahnya sudah habis, maka suami tidak boleh rujuk atau kembali kepadanya kecuali dengan akad nikah yang baru dan membayar mahar baru pula.⁵⁸

لا نذر لابن ادم فيما لا يملك , ولا عتق له فيما لا يملك , ولا طلاق له فيما لا يملك)
(

Artinya: “tidak ada nazar bagi anak cucu adam (manusia) terhadap sesuatu yang bukan miliknya, tidak ada pembebasan (hamba sahaya) bagi seorang terhadap hamba sahaya yang bukan miliknya dan tidak ada talak bagi (seorang laki-laki) terhadap (perempuan) yang bukan isterinya”.⁵⁹

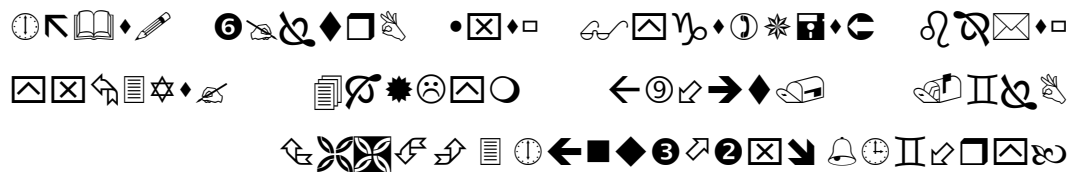
Namun, para ulama berbeda pendapat terhadap pengulangan lafaz talak dalam masa iddah, antara lain:

⁵⁸ Djamaan Nur, *op.cit*, h. 139

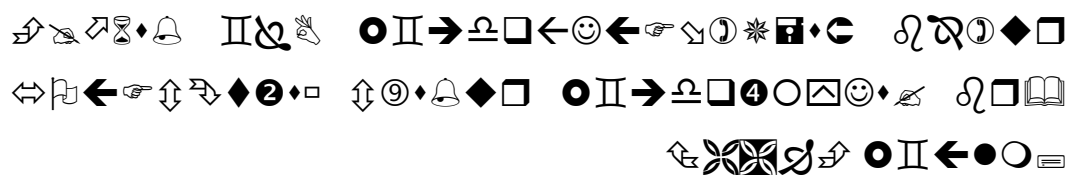
⁵⁹ Muhammad Muhyi Addin ‘Abdu Al-Hamid, *Sunan Abi Daud*, (tt: Darul Fikr, th), 2190, jilid I, h. 665

1. Jumhur ulama dari keempat imam mazhab dan selain mereka (Ibnu Abidin (3/397), Ashal Al Madarik (2/138), Takmilah Al Majmu' (17/262), dan Al Mughni (8/477) berpendapat, isteri yang tertalak raj'i sama statusnya seperti isteri yang masih dalam tanggungannya ('ishmah) suami. Suami boleh menambah talak kepada isterinya dalam masa 'iddah, seperti dibolehkan menyusul zihar, li'an dan ila'nya, serta masing-masing dari keduanya saling mewarisi,⁶⁰ namun suami tidak boleh melakukan talaknya manakala talaknya itu adalah talak ba'in.⁶¹

Mereka berdalil dengan firman Allah:



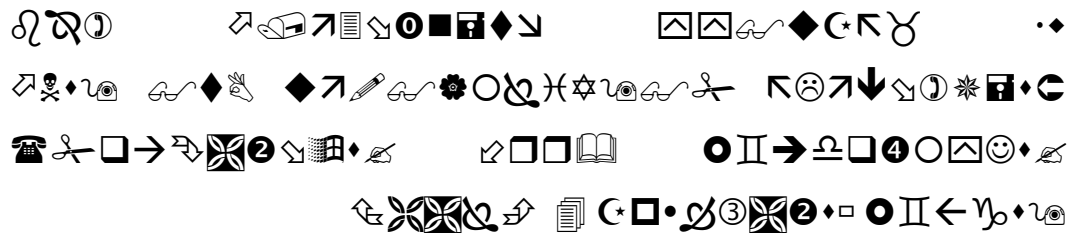
Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain”. (QS. Al-baqarah: 230)



Artinya: “Jika kamu menceraikan Isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya”. (QS. Al-baqarah: 237)

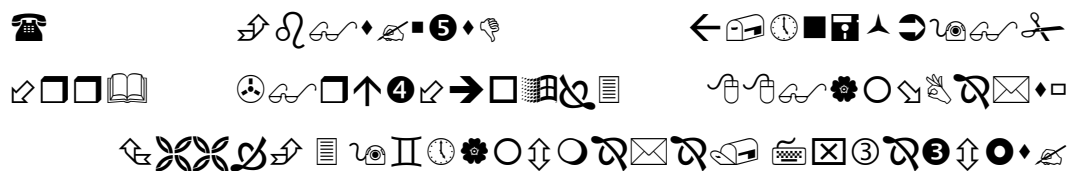
⁶⁰ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid 3, h. 423

⁶¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), h. 480, Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 228



Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya”. (QS. Al-Baqarah: 236)

Pada dasarnya, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa menjatuhkan satu kali talak, dua kali, dan tiga kali talak hukumnya boleh, karena ayat al-Qur’an diatas tidak membedakan antara menjatuhkan talak satu kali, dua kali atau tiga kali.⁶²



Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”. (QS. Al-baqarah: 229)

Bila dilihat dari teks lahiriyahnya, ayat ini membolehkan talak tiga kali atau dua kali secara sekaligus atau secara terpisah.⁶³

⁶² Sayyid Sabiq, jilid 4, *op.cit*, h. 39

⁶³ *Ibid*

طلق امرأته سهيمة , والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول
الله عليه وسلم ()

*Artinya: “bahwasanya Rukanah telah mentalak isterinya, Suhaimah sama sekali (talak tiga sekaligus), lalu dia berkata “demi Allah, aku tidak memaksudkan itu melainkan sekali (talak) saja”. Maka Nabi SAW pun mengembalikan (masalahnya) kepadanya”.*⁶⁴

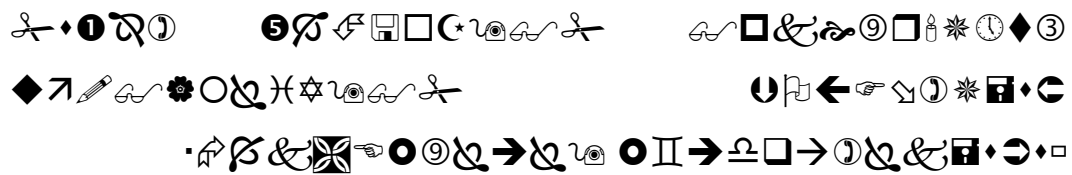
Dalam hadis yang diriwayatkan Rukanah diatas disebutkan, bahwa Rasulullah SAW memintanya agar bersumpah bahwa Rukanah mengucapkan sekian banyak ucapan talak, tapi yang dia inginkan sebenarnya hanyalah satu kali talak. Ini menunjukkan bahwa jika ia ingin menjatuhkan tiga kali talak, tentu akan jatuh talak tiga.⁶⁵

2. Sedangkan menurut Imamiyah mengatakan bahwa: talak tidak boleh dijatuhkan kepada wanita yang sedang menjalani iddah, baik talaknya itu talak ba'in maupun talak raj'i, kecuali sesudah wanita itu dirujuk terlebih dahulu. Sebab tidak ada artinya menalak seorang wanita yang sudah ditalak.⁶⁶ Demikian juga menurut syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah r.a berpendapat, wanita yang di talak raj'i tidak boleh disusul dengan talak lainnya, meskipun isteri masih dalam masa 'iddah. Mereka berdalil dengan firman Allah SWT:

⁶⁴ Muhammad Muhyi Addin 'bdu Al-Hamid, *Sunan Abi Daud*, 2206, jilid I, *op.cit*, h. 671

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4, *op.cit*, h. 41

⁶⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit.*, h. 480



Artinya: “*Hai nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya (yang wajar).*” (Ath- Thalaq: 1).⁶⁷

Ayat ini menunjukkan bahwa, tidak boleh mengiringkan talak pada talak sebelumnya sehingga habis masa iddah atau merujuknya. Karena dibolehkan talak adalah untuk iddah, yakni untuk menghadapi masa iddah. Sehingga bila seorang suami menalak isterinya lagi pada masa iddah dengan talak kedua dan talak disusulkan itu tidak berpengaruh pada isterinya (dianggap tidak ada).⁶⁸

Menurut Ibnu Taimiyah, siapa yang berpegang pada petunjuk Al-Qur'an dan apa yang ditunjukkan oleh sejumlah atsar, maka ia akan mengatakan bahwa talak yang disyari'atkan Allah adalah talak yang diikuti dengan iddah, dan orang yang menalaknya mempunyai hak pilih antara mempertahankan dengan cara yang ma'ruf atau melepaskan dengan cara yang ma'ruf pula.⁶⁹ Inilah menurut Ibnu Taimiyah yang menafikan jatuh talak tiga dalam masa iddah sebelum rujuk. Jadi, talak yang dijatuhkan dalam masa iddah adalah tidak boleh, karena itu bukan talak untuk menghadapi masa iddah.⁷⁰

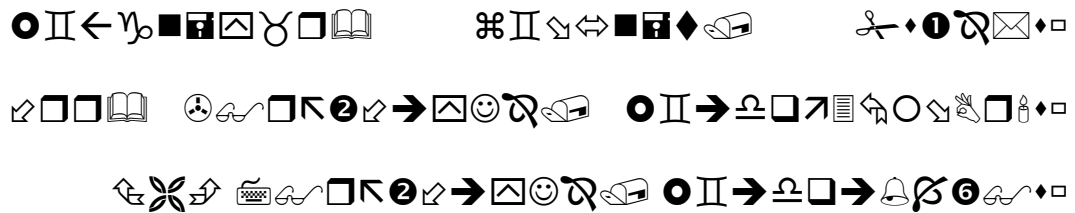
Alasan lain, Allah SWT berfirman:

⁶⁷ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 558

⁶⁸ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, jilid 4, *op.cit.*, h. 364-365

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ *Ibid*



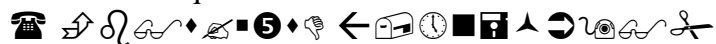
Artinya: *"Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang baik atau lepaskanlah mereka dengan baik."*

(Ath- Thalaq: 2).⁷¹

Allah memberikan pilihan kepada suami antara rujuk atau membiarkan untuk menghabiskan masa iddahnya lalu melepaskan dengan cara yang ma'ruf. Jika suami menalak isteri dengan talak kedua sebelum habis masa iddah, berarti suami tidak menahan dengan cara yang ma'ruf dan tidak pula melepaskan dengan cara yang ma'ruf pula.

Demikian juga dengan pendapat Az-Zubair bin al-Awwam, Abdurahman bin 'Auf, Ali, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Pendapat banyak tabi'in dan generasi setelah mereka, seperti Thawus, dan Muhammad bin Ishaq. Ini juga pendapat Dawud azh-Zhahiri dan mayoritas sahabatnya, sebagian sahabat Abu Hanifah, Malik dan Ibnu Qayyim.⁷² Mereka berhujjah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 229



Artinya: *"talak yang dapat dirujuki dua kali"*.

Allah menjelaskan bahwa talak yang telah disebutkannya dan talak raj'i yang mempunyai hak rujuk adalah dua kali, yaitu satu demi satu. Sebagaimana bila dikatakan kepada seseorang: bertasbihlah dua kali, atau bertasbihlah tiga kali

⁷¹ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 558

⁷² Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, jilid 4, *op.cit.*, h. 385

atau seratus kali, maka ia harus mengucapkan subhanallah, sebanallah, hingga mencapai sekian kali (secara global), berarti ia hanya bertasbih satu kali.

Demikian pula orang yang mengatakan kepada isterinya: Engkau ditalak dua, tiga, sepuluh atau seribu, maka sebenarnya suami hanya mentalak satu kali.

Jika seorang suami hendak merubah sifat talak disyari'atkan, dengan menjadikannya sebagai sebab perpisahan yang tidak ada rujuknya dengan menggabungkan tiga talak, maka ia tidak berhak melakukannya, karena itu termasuk merubah syari'at Allah dan menghapusnya setelah wafatnya Nabi, dan ini tidak di perbolehkan. Berdasarkan hal itu, talak tersebut menjadi talak satu raj'i dan talak kedua atau ketiganya diabaikan.⁷³

Nabi SAW bersabda:

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ص .

سنتين من خلافة عمر ,

في أمر كان لهم فيه اناة, فلو امضيناه عليهم فأمضاه عليهم. ()

Artinya: “Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu ia berkata, “dulu, talak pada masa Rasulullah Alaihi wa Sallam, Abu Bakar dan dua tahun dari masa kekhalifahan Umar, talak tiga (yang diucapkan sekali) itu berarti sekali (talak). Maka Umar bin Khattab berkata, “sesungguhnya orang-orang itu sangat tergesa-gesa dalam perkara yang seharusnya mereka bisa bersikap pelan-pelan (tidak terburu-buru). Andai saja kami tetapkan hal itu atas mereka, maka ia akan menjadi ketetapan yang berlaku atas mereka”, (HR. Muslim).⁷⁴

Hadis ini shahih dari berbagai jalur dari Ibnu Abbas r.a dan, yang dipermasalahkan adalah bagaimana dihukumi sah dari Umar sesuatu yang

⁷³ Ibid, h. 386

⁷⁴ Muhammad Fuad ‘Abdu Al-Baqy, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihyak at-Tirasul ‘Arabi, th), 1472, jilid II, *op.cit*, h. 1099

bertentangan dengan hukum yang sudah ada pada masa Nabi SAW, lalu masa Abu Bakar dan awal-awal masa pemerintahannya. Zahir perkataan Ibnu Abbas bahwa Ijma' menyatakan demikian, tapi hal ini masih dipermasalahkan oleh para ulama.

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: . فقال له رسول الله

: . : اني طلقته ثلاثا , : راجعها. ()

Artinya: “ *Dan dari Ibnu Abbas RA ia berkata: “Abu Rukanah mentalak Ummu Rukanah. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, “Rujuklah Isterimu” Dia pun Berkata, “sesungguhnya saya telah mentalaknya tiga.” Beliau berkata, “Aku sudah tahu, rujuklah dia”.* (HR. Abu Daud).⁷⁵

Hadis ini merupakan dalil bahwa mengucapkan talak tiga dalam satu majelis itu sama saja dengan talak satu.

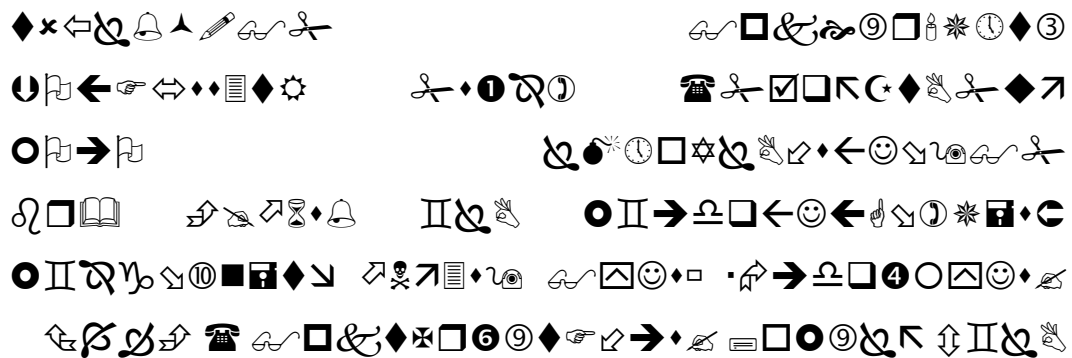
3. Pendapat yang lain, mereka membedakan antara isteri yang telah disetubuhi dan yang belum. Maka jatuh talak bagi isteri yang telah disetubuhi dan jatuh talak satu bagi isteri yang belum disetubuhi. Ini merupakan pendapat dari sekelompok orang pengikut Ibnu Abbas, Ishak bin Rahuyah juga mengemukakan pendapat ini.⁷⁶ Namun pendapat mereka dapat dibantah bahwa, talak tidak sah dijatuhkan kepada perempuan yang telah ditalak sebelum bersetubuh, karena ikatan pernikahan antara kedua pasangan tersebut telah berakhir dan suami dianggap sebagai orang asing bagi isterinya, hanya karena

⁷⁵ Muhammad Muhyi Addin ‘Abdu Al-Hamid, *Sunan Abi Daud*, 2196, Jilid I, *op.cit*, h. 667, lih, Moh. Machfuddin Aladip, *Bulughul Maram, Terjemahan*, (Semarang: PT. Toha Putra, th), h. 547

⁷⁶ Muhammad bin Ismail al-AmirAsh-Shan’ani, *op.cit*, h. 33

munculnya kata-kata talak yang pertama, Atau Engkau ditalak, engkau ditalak, engkau ditalak. Oleh sebab itu, perempuan itu tidak dapat ditalak lagi, karena dia bukan lagi isterinya dan bukan pula sebagai perempuan yang sedang dalam masa iddah yang berada dibawah kekuasaannya.⁷⁷

Sebagaimana firman Allah:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya”. (QS. Al-Ahzab: 49).

Al-Allamah Abu al-Asybal berkata, yang diberlakukan Umar bin Khattab r.a adalah apabila suami mengatakan kepada isterinya “Engkau ditalak tiga” dengan mengulangnya sebanyak tiga kali, baik itu dalam satu majelis maupun dibeberapa majelis selama masih dalam masa iddah. Inilah yang dinilai oleh Umar sebagai talak tiga, dengan pertimbangan talak bisa disusulkan pada wanita yang tengah menghadapi masa iddah, dan ia telah menjadi wanita yang menjalani masa iddah dengan lafal pertama dari talak-talak yang dilontarkan oleh suaminya secara

⁷⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 4, *op.cit*, h. 17

Artinya: *"Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang baik atau lepaskanlah mereka dengan baik."*

(Ath- Thalaq: 2)

Talak yang disyari'atkan Allah adalah talak yang diikuti dengan iddah. Allah memberikan pilihan kepada suami antara rujuk atau membiarkan isteri untuk menghabiskan masa iddah lalu melepaskan dengan cara yang ma'ruf. Jika seorang suami menalak dengan talak kedua sebelum habis masa iddah, berarti suami tidak menahan dengan cara yang ma'ruf dan tidak pula melepaskan dengan cara yang ma'ruf pula.

Kendati penulis berpendapat inilah hukum asalnya, tapi apabila hakim melihat adanya kemaslahatan dalam memberlakukan jenis talak ini menjadi talak dua atau tiga, sebagai ta'zir (hukuman) dan semisalnya, maka silahkan hakim melakukan seperti yang telah dilakukan oleh Umar dan mendapat persetujuan para sahabat. Demikian juga dengan cerai talak dipengadilan Agama Bangkinang, walaupun dalam Islam suami mempunyai kekuasaan memegang tali perkawinan, namun Pengadilan Agama menganggap perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan, karena Pengadilan memandang wajib adanya saksi dalam talak, sebagaimana pendapat sebagian besar ulama Syi'ah Imamiyah, pendapat Ali bin Abi Thalib dan ulama lain, bahwa mempersaksikan talak adalah wajib dan merupakan syarat sah talak. Pelaksanaan talak di Pengadilan Agama adalah untuk menjaga hak isteri, mempersulit terjadinya perceraian, pentingnya menghimpun putusan-putusan/pencatatan perceraian dan dapat dijadikan sebagai bukti apabila salah satu pihak ada yang mengingkarinya dikemudian hari.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dilihat dari segi proses penyelesaian talak yang sudah terjadi di luar sidang Pengadilan Agama, disini terjadi pengulangan lafaz talak, yakni lafaz talak yang diucapkan di luar sidang Pengadilan dan lafaz talak yang diucapkan depan sidang Pengadilan Agama. Menurut penulis, lafaz talak yang diucapkan suami di depan sidang Pengadilan Agama ketika isteri masih berada dalam masa iddah, talaknya tidak di hitung/tidak jatuh, apabila lafaz talak yang diucapkan di Pengadilan Agama tersebut setelah habis masa 'iddah, maka talaknya juga tidak jatuh/tidak di hitung (karena talak hanya ada dalam ikatan suami isteri), dan jika talak yang diucapkan di depan Pengadilan Agama tersebut setelah suami rujuk maka talaknya jatuh/dihitung. Wallahu a'lam bish showaab.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis, maka skripsi yang berjudul Proses Penyelesaian Talak yang Sudah Terjadi di Luar Sidang Pengadilan Agama ditinjau Menurut Hukum Islam ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan talak dipengadilan Agama Bangkinang, suami mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Agama, penetapan majelis hakim, penetapan hari sidang, Pemohon dan Termohon di panggil untuk menghadiri persidangan, pada saat sidang pertama adalah pembacaan surat permohonan dan upaya perdamaian melalui mediator yang ditunjuk oleh hakim Pengadilan Agama Bangkinang. Selanjutnya pemeriksaan alat bukti, tahap pembacaan putusan Pengadilan dan terakhir adalah pembacaan ikrar talak oleh Pemohon (suami) didepan sidang Pengadilan Agama Bangkinang setelah putusan itu berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).
2. Penyelesaian talak di Pengadilan Agama Bangkinang terhadap talak yang terjadi diluar sidang Pengadilan Agama Bangkinang sama dengan penyelesaian kasus talak pada umumnya, mulai dari pengajuan permohonan cerai talak oleh pemohon, proses mediasi, pemeriksaan saksi-saksi sampai pada pembacaan putusan Pengadilan dan pengucapan lafaz talak di depan sidang Pengadilan Agama Bangkinang. Berdasarkan UU perkawinan No 1 tahun 1974 "*perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama...*".

Talak yang diucapkan diluar sidang Pengadilan Agama Bangkinang tidak menjadi pertimbangan oleh hakim pada saat sidang.

3. Menurut Undang-undang, talak hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama, karena Pengadilan memandang wajib adanya persaksian dalam talak dan merupakan syarat sah talak sekalipun hak talak itu adalah milik suami. Ditinjau dari segi Proses penyelesaian talak yang sudah terjadi di luar sidang Pengadilan Agama menurut hukum Islam, maka disini terjadi pengulangan lafaz talak, yakni talak yang di ucapkan di luar sidang Pengadilan agama dan talak yang di ucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Menurut penulis, lafaz talak yang di ucapkan suami di depan sidang Pengadilan Agama ketika isteri masih berada dalam masa iddah, talaknya tidak di hitung/tidak jatuh, apabila lafaz talak yang di ucapkan di Pengadilan Agama tersebut setelah habis masa 'iddah, maka talaknya juga tidak jatuh/tidak di hitung (karena talak hanya ada dalam ikatan suami isteri), dan jika talak yang di ucapkan di depan Pengadilan Agama tersebut setelah suami rujuk maka talaknya jatuh/dihitung. Wallahu a'lam bish showaab.

B. Saran

1. Kepada para suami hendaklah selalu bersabar dalam menghadapi konflik dalam rumah tangganya dan tidak mengucapkan lafaz talak di luar sidang Pengadilan Agama Bangkinang walaupun perceraian itu merupakan hak dan kewenangan suami yang boleh menjatuhkan talak kapan saja yang suami inginkan.

2. Ditujukan kepada pembuat Undang-undang Peradilan (pihak yang memiliki kompetensi untuk itu) bahwa jika suami membawa kasusnya ke pengadilan Agama (yaitu yang telah mengucapkan lafaz talak diluar sidang Pengadilan Agama) maka suami tidak perlu mengucapkan lafaz talak lagi di Pengadilan Agama, suami cukup menjelaskan kepada hakim bahwa ia telah mengucapkan lafaz talak diluar sidang Pengadilan Agama, dalam arti kata Pengadilan Agama hanya melakukan isbath talak (penetapan talak). Ini merupakan jalan tengah dan untuk lebih berhati-hati terhadap jatuh tidaknya pengulangan lafaz talak.
3. Pengadilan Agama Bangkinang hendaklah melakukan pendataan kepada para suami yang telah menceraikan isterinya di luar sidang Pengadilan Agama untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat yang belum sepenuhnya melaksanakan UU No. 1 tahun 1974 terutama tentang tata cara perceraian di Pengadilan Agama.
4. Pengadilan Agama Bangkinang hendaklah melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya dapat mengurangi adanya perceraian di luar sidang Pengadilan Agama Bangkinang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdu Al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahibi al-Arba'ah*, (Libanon: Maktabah Tijariyah, 1986)
- Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1992)
- Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006)
- Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006*, (Yogyakarta: UII Press, 2007)
- Abu bakar Syathan, *I'anatut Thalibin*, (Mekkah: Darul Ihyak Al- Kutub, th), Juz 4
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid 3
- , *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006), jilid 4
- Abu Zahrah, *Al- Ahwalu Al- Syakhshiyah*, (Kairo: Darul Fikr Al- Araby, 1958)
- Al- Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amami, 1985)
- Al- Imam As- Syafi'i, *Al-Umm (Kitab Induk)*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1989)
- Amir Syarifuddin dan harun Al Rashid, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah tentang Badan-badan Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, th)
- Amru Abdul Mun'im Salim, *Fikih Talak Berdasarkan Al-Qur'an & Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005)
- Buku Profil dan Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang, 2011
- Buku Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang, 2011
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006)
- Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993)

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Moh Mahfuddin Aladip, (Bandung: Al- Ma'arif, th)

-----, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006)

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mijtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), jilid 2

-----, *Bidayatul Mujtahid*, (Kairo: Mustafa Al-Babil, 1345), jilid II

Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, (Jakarta: Karya Indah, 1986)

Idris Marbawi, *Kamus Marbawi*, (Bandung; al- Ma;arif, th)

Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), jilid 7

Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: FokusMedia, 2005)

Mahmud Khalil, *Sunan Ibnu Majah*, (tt: Maktabah Abi Al-Ma'athy, th)

Mahmud Syaltuth, *Fiqih Tujuh Mazhab*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000)

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1982)

Maliki, *Al- Muwattha'*, (Kairo: Mustafa Al-Babi Al- Halabi, 1951), Jilid II

Moh. Asnawi, *Himpunan Peraturan dan Undang-undang RI Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*, (Menara: Kudus, 1975)

Moh. Machfuddin Aladip, *Bulughul Maram, Terjemahan*, (Semarang: PT. Toha Putra, th)

Moh. Rifa'i, *Kifayatul Akhyar, Terjemahan Khulashah*, (Semarang: PT. Toha Putra, 1978)

Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005)

Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008)

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), Jilid 3

- Muhammad Fuad Abdu Al-Baqy, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihyak at-Tirasul ‘Arabi, th)
- Muhammad Muhyi Addin ‘bdu Al-Hamid, *Sunan Abi Daud*, (tt: Darul Fikr, th),
- Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993)
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007)
- Muhammad Zuhri, *Hadits Shahih Bukhari*, terjemahan, (Semarang: Toha Putra, 1982)
- M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari’ah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988)
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: al-Ma’arif, 1990), Juz VIII
- , *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), Jilid 4
- Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988)
- Syaikh Al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2010)
- Undang- undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (Medan: Duta Karya, 1995)
- Undang- undang RI No. 7 tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*, (Surabaya: Pengadilan Tinggi Agama, 1992)
- UURI. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009)
- Wahbah Al- Zuhaily, *Al-fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al- Fikr, 1989)
- Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1992), Cet. I